

10668

**PALANG MERAH INDONESIA SULAWESI SELATAN 1945-1992**

(Suatu Tinjauan Sejarah Sosial)



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	14-2-2000
Asal dari	FAR. SASTRA
Banyaknya	2 CDUJERS.
Harga	HADIAH
No. Inventaris	000A030F
No. Klas	

S E R I E S

Kejadian sosial masyarakat setelah revolusi sebagai kajian  
dalam perspektif dan Sastra  
Jurnal Sejarah dan Arkeologi  
Fakultas Sastra

Oleh

**AGUSTINUS**

90 07 345

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG  
1998

PALANG MERAH INDONESIA SULAWESI SELATAN 1945-1992

( Suatu Tinjauan Sejarah Sosial )

"Skripsi ini saya persembahkan buat  
kedua orang tua tercinta"

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA

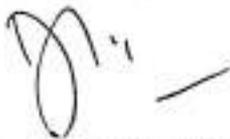
PENGESAHAN

Sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor : 043/PT04.H5.FS/C/1996, tanggal 11 Januari 1996, dengan ini kami menerima dan menyetujui skripsi ini.

Ujung Pandang, 30 Maret 1998

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



(Drs. Daud Limbugau, S.U.)  
NIP. 130 190 505

(Drs. Bambang S. M.S.)  
NIP. 131 480 197

Disetujui untuk diteruskan  
Kepada Panitia Ujian Skripsi

Dekan,

U.b. Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi  
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin



(Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum.)  
NIP. 131 475 315

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini tanggal 30 Maret 1998, Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik karya ilmiah ini dengan judul "PALANG MERAH INDONESIA SULAMESI SELATAN 1945 - 1992 (Suatu Tinjauan Sejarah Sosial)"

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Sastra (Sejarah) pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, 30 Maret 1998

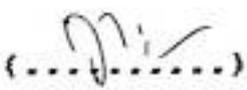
Panitia Ujian Skripsi

Ketua : Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum. (.....) 

Sekretaris : Drs. Anwar Thosibo, M. Hum. (.....)

Penguji I : Abd. Latif, M. Hum. (.....) 

Penguji II : Drs. Abd. Rasyid, M.A. (.....)

Konsultan I : Drs. Daud Limbugau, S.U. (.....) 

Konsultan II : Drs. Bambang Soelistiyo, M.S. (.....)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Ada berbagai rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini, tetapi melalui ketekunan dan kerja keras yang disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, akhirnya penulisan skripsi ini dapat juga selesai pada waktunya.

Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis selalu membuka diri untuk menerima koreksi atau kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi yang sederhana ini. Koreksi atau kritik tersebut tidak saja berguna untuk memperbaiki karya penulis, tetapi juga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis geluti selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan, dorongan semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hormati. Selayaknyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

- 1). Drs. Mustafa Makka, M.S. selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin;
- 2). Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin;
- 3). Drs. Daud Limbugau, S.U dan Drs. Bambang Sulistiyo, M.S selaku Konsultan I dan II, yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan yang tak mengenal lelah sehingga skripsi ini dapat penulis rampungkan;
- 4). Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin;
- 5). Karyawan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik;
- 6). Kedua orang tua yang tercinta dan segenap keluarga yang telah mengasuh, membimbing dan berdoa demi tercapainya cita-cita penulis;
- 7). Rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang telah membantu penulis yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu;

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Semoga pula karya ini dapat diterima sebagai sumbangan pikiran penulis yang ada nilainya untuk pembangunan bangsa Indonesia, khususnya kepada aspek kesejarahan di Republik Indonesia yang kita cintai bersama, Amien.

Ujung Pandang, 30 Maret 1998

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Alasan Memilih Judul .....	4
1.2. Masalah dan Batasan Masalah .....	6
1.3. Metodologi .....	8
BAB II SULAWESI SELATAN 1945 - 1972	
2.1. Masa Awal Kemerdekaan .....	15
2.2. Masa Republik Indonesia Serikat .....	22
2.3. Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	26
2.4. Masa Orde Baru .....	35
BAB III LATAR BELAKANG KEGIATAN	
3.1. Latar Belakang Pembentukan International Commettee of The Red Cross .....	42
3.2. Prinsip-Prinsip Internasional Commettee of The Red Cross .....	45
3.3. Pembentukan Palang Merah Indonesia .....	47

BAB	IV	PALANG MERAH INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN	
		1972 - 1992	
	4.1.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya PMI (PMR dan KSR) .....	51
	4.2.	Pelayanan Usaha Transfusi Darah (PUTD)..	61
	4.3.	Sumber Dana .....	64
BAB	V	KESIMPULAN .....	68
DAFTAR		PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN		DAFTAR INFORMAN .....	75

## ABSTRAK

Studi tentang sejarah sosial yang mengamati perkembangan suatu masyarakat, dewasa ini mendapat perhatian yang besar dari pada sejarawan, terutama dalam mengangkat suatu tulisan ke atas suatu permukaan. Sejarah sosial yang mencakup secara demografis, yaitu suatu pertumbuhan penduduk dalam berbagai kegiatan yang di dalamnya mendapat pelayanan, kemudahan dan sebagainya.

Dengan pemahaman tersebut, Palang Merah Indonesia sebagai salah satu organisasi yang unit kerjanya memberikan berupa bantuan pertolongan kepada sesama, telah menunjukkan andilnya terutama dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana. PMI dalam melaksanakan misinya telah melaksanakan kerja sama dari berbagai instansi baik negeri maupun swasta yang pada gilirannya dapat memperlancar dalam usaha pemberian pertolongan.

Dengan melihat misi yang diemban oleh PMI, maka masyarakat sebagai pihak yang senantiasa mendapat musibah, senantiasa berhati-hati dimana tidak setiap saat terjadi bencana, tidak juga setiap waktu peperangan meletus yang mengakibatkan kesengsaraan bahkan pada umumnya menjadi korban orang-orang yang tidak berdosa. Oleh sebab itu masyarakat perlu siaga, dan tantangan ini telah terjawabkan oleh ketangguhan dari pengurus dan anggota PMI.

## BAB I PENDAHULUAN

Palang Merah Indonesia (PMI) lahir satu bulan tepat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Terbentuk pada saat rakyat Indonesia tengah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru dicapainya. Saat itu PMI mempunyai peranan yang menonjol. Cukup banyak tugas-tugas kemanusiaan yang ditanganinya untuk membantu korban perang tanpa membedakan dari pihak mana korban berasal. Peranan ini membuktikan bahwa PMI dapat melaksanakan tugas kemanusiaan Palang Merah dan sekaligus menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta akan perdamaian.<sup>1)</sup>

Sejak awal terbentuknya, yaitu tahun 1945, Palang Merah Indonesia telah berperan aktif turut membantu menangani masalah-masalah kemanusiaan yang tidak terhindarkan saat itu. Bahkan kemampuannya dalam menjalankan selama itu berpengaruh positif terhadap pengakuan Republik Indonesia secara de facto. Selanjutnya Palang Merah Indonesia tetap setia mengikuti pasang surutnya perkembangan jaman. Semakin hari organisasi tersebut semakin berkembang, dengan kekuatan sumber daya

---

1) Irna Susanti Hardiawan dkk, 45 Tahun Palang Merah Indonesia, (Jakarta, 1990), hal. 3.

yang terdiri dari Palang Merah Remaja, Korps Suka Rela dan tenaga-tenaga sukarela lainnya yang semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menjadikan akan semakin luasnya jangkauan pelayanan Palang Merah Indonesia kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>2)</sup>

Palang Merah sebagai gerakan kemanusiaan yang secara organisatoris merupakan perhimpunan sukarela masyarakat memiliki dimensi yang tidak sama. Titik pangkal gerakan memang tampaknya sederhana, yaitu bertujuan melakukan pertolongan guna meringankan penderitaan sesama manusia yang tertimpa bencana. Untuk dapat melakukan tindakan memberikan pertolongan kepada orang lain, maka pertama-tama diperlukan niat baik dari orang Palang Merah untuk senantiasa siaga atau siap setiap saat memberikan pertolongan yang diperlukan. Oleh sebab itu orang Palang Merah harus menjaga kesehatan dan memupuk kekuatan diri sendiri. Tanpa kondisi yang sehat dan kuat, mustahil seseorang mampu menolong atau membantu orang lain.<sup>3)</sup>

Sejarah telah mencatat bahwa semangat Palang Merah telah menjadi semangat dunia. Gerakan Palang Merah lahir dari hasrat untuk menolong sesama manusia yang sedang

---

2) Siti Hardianti Rukmana, "Sambutan Ketua Umum Palang Merah dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke 50 Palang Merah Indonesia 17 September 1995," Suara PMI, (Edisi No. 32 September 1995), hal. 5

3) Ibnu Sutowo, "Dimensi dalam Gerakan Palang Merah," Berita Organisasi, (No. 27 Desember 1992), hal. 4.

menderita. Sejarah umat manusia dari waktu ke waktu sepertinya selalu diiringi oleh kisah-kisah penderitaan, baik yang disebabkan oleh alam lingkungannya, hal ini setiap saat dapat diikuti lewat media massa, baik cetak maupun elektronika. Karena itu usaha untuk meringankan penderitaan sesama manusia merupakan usaha yang sangat mulia dan tidak akan kunjung habis selama dunia berkembang.<sup>4)</sup>

Oleh sebab itu perjalanan sejarah tidak bisa diingkari karena keberadaannya merupakan hasil keputusan kultur suatu bangsa. Perasaan senasib dan seperjuangan merupakan watak kultur dalam kebersamaan yang menjiwai semangat perjuangan bangsa untuk melahirkan karya besar berupa kemerdekaan dan sebulan kemudian disusul dengan lahirnya PMI. Lahirnya karya besar ini karena adanya kepeloporan dalam masyarakat yang didasarkan atas kerelaan, kesetiaan, kejujuran dan kesanggupan untuk berani berkorban.<sup>5)</sup>

---

4) Muhammad Yusuf Saman, "Tugas dan Fungsi Deppen dengan Tugas PMI Membina Masyarakat Pedesaan," (Pengarahan yang Disampaikan Kepala Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan pada Musda VI PMI Daerah Sulawesi Selatan, Ujung Pandang 1992), hal. 2.

5) I b i d., hal. 3.

### 1.1 Alasan Memilih Judul

Seiring dengan berakhirnya perang kemerdekaan, PMI menata diri, melakukan konsolidasi, membenahi organisasi. Sebab walaupun perang berakhir tetapi pengabdian dari PMI tidak mengenal akhir. Ia harus selalu siap dalam keadaan perang maupun damai. Tugas pasca perang tersebut diantaranya melanjutkan upaya meringankan penderitaan yang disandang sebagai akibat perang, mempertemukan kembali para anggota keluarga yang terpisah, serta memberikan berbagai bantuan lain guna mengurangi bantuan masyarakat.

Atas dasar kepahlawannya, yang baru lahir langsung terjun dalam kawah candradimuka dan berhasil mengembang tugas dengan gemilang. Pada tanggal 16 Januari 1950 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan keputusan nomor 25/1950 tentang pengesahan berdirinya PMI yang pengurusnya besarnya berkedudukan di ibukota negara yakni Jakarta. Dan pada tanggal 15 Juni 1950, PMI diakui oleh International Committee Of The Red Cross (ICRC) dengan surat keputusan nomor 392, serta tanggal 16 Oktober 1950, PMI diterima menjadi anggota Liga Internasional Palang Merah dengan keanggotaan nomor 68.

Pada masa-masa selanjutnya PMI tak pernah lepas dari dinamika perjuangan bangsa melalui aktivitasnya yang tak pernah berhenti. Dengan dukungan para anggotanya yang setia, PMI telah tumbuh menjadi organisasi besar dengan kaderisasi berkesinambungan dan kepengurusan yang kokoh.

Kekokohan itu bisa dilihat antara lain keberadaan PMI daerah, PMI cabang dan PMI ranting di seluruh Indonesia. Anggotanya tersebar diberbagai tempat baik mereka yang sudah bekerja maupun masih pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Korps Sukarela atau (KSR) maupun Palang Merah Remaja (PMR) bahkan tak sedikit aktivis yang sepanjang hidupnya diserahkan sepenuhnya untuk mengabdikan kepada PMI.

Sebagai dasar pertimbangan untuk memilih judul yang pada hakikatnya tidak terlepas dari uraian diatas, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pendapat yang mengatakan bahwa :

"Hanya suatu Indonesia yang merasa dirinya satu, sambil memperjuangkan segala perbedaan-perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain, dapat mematahkan penjajah. Tujuan bersama pembebasan Indonesia meminta dengan keras suatu aksi umum yang insyaf, bersifat kebangsaan dimana turut campurnya segala lapisan rakyat Indonesia" (Pringgodikdo, 1990 : 9).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh kelompok kelas atas saja, akan tetapi peranan dari semua kelompok masyarakat itu sangat besar. Namun demikian dapat dilihat dari sekian banyaknya tulisan sejarawan, sangat langka ditemukan tulisan yang menampilkan usaha-usaha yang dilakukan orang-orang yang terlibat dalam kepalangmerahan sebagai faktor dalam suatu peristiwa sejarah.

Suatu deskripsi yang terdapat dalam tulisan ini yang menampilkan partisipasi PMI dalam perjalanan sejarah di Sulawesi Selatan. Perjalanan sejarah di Sulawesi Selatan dalam usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan cukup memperlihatkan perjuangan yang kompleks dalam arti dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataannya sampai saat ini belum ada sejarawan yang menuangkan tulisannya akan kegiatan kepalangmerahan di Sulawesi Selatan.

Karena kita telah ketahui perjuangan PMI itu berfokus pada perjuangan di bidang kemanusiaan, sehingga tertarik atas kajian tersebut, dan layaklah bila penulis melahirkan suatu tulisan tentang : "Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan 1945 - 1992" (Suatu tinjauan Sejarah Sosial).

## 1.2 Masalah dan Batasan Masalah

Palang Merah Indonesia yang dengan setia mendampingi dan sekaligus berada dalam arus perjuangan nasional sejak tahun 1945, senantiasa merasa bahwa gerakan palang merah dengan salah satu azasnya yang paling kuat yaitu; kemanusiaan, akan dapat selalu memberikan derma baktinya bagi perjuangan dan pembangunan bangsa.<sup>7)</sup>

Tidak setiap saat terjadi bencana alam, tidak juga setiap waktu peperangan meletus, akan tetapi walaupun ilmu

---

7) Andi Tau, Buku Informasi Palang Merah Indonesia, (Ujung Pandang : Markas PMI Ujung Pandang, 1992), hal. 16.

pengetahuan telah banyak membantu manusia untuk dapat memperhitungkan gejala alam, pada hakekatnya hingga kini sering bencana itu tiba tanpa disangka-sangka. Hampir setiap orang mendambakan hadirnya kedamaian, namun tidak jarang situasi memaksa terjadinya pertumpahan darah. Semua ini mengakibatkan kesensaraan dan penderitaan, bahkan pada umumnya menjadi beban orang-orang yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, masyarakat perlu siaga, masyarakat jangan sampai terlena menghadapi kemungkinan terburuk dengan mempersiapkan pertolongan terhadap sesama.

PMI sebagai perhimpunan sosial yang terdiri dari anggota masyarakat dan bekerja untuk masyarakat berusaha mengorganisasikan kesiagaan itu dan bekerja sama dengan masyarakat luas membantu pemerintah untuk memecahkan masalah penderitaan manusia melalui pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>8)</sup> Sehingga untuk membatasi uraian ini, maka penulis memperhatikan tiga persoalan yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi yang membuat Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan turut campur tangan dalam usaha meringankan penderitaan rakyat ?
2. Bagaimana bentuk tantangan yang dihadapi Palang Merah Indonesia dalam melaksanakan tugasnya ?

---

8) I b i d., hal. 1.

3. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia sehingga lebih mudah menanggulangi beberapa bencana ?

### 1.3 Metodologi

Mengingat dalam suatu penulisan sejarah metode adalah merupakan suatu alat untuk menentukan kadar validitas suatu tulisan sejarah.<sup>9)</sup> Para sejarawan selalu berupaya memahami masa lalu dengan baik untuk dikonsumsi dalam masa sekarang, serta guna merumuskan arah perkembangan masa datang yang diinginkan. Untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar terhadap masa silam, maka penelusuran terhadapnya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip metodologis yang diisyaratkan dalam ilmu sejarah. Metodologi sebagai salah satu cabang komponen penting dalam setiap cabang ilmu pengetahuan mesti terbuka untuk dikaji kebenarannya karena kesalahan dan ketidaksesuaian antara metodologi dengan obyek yang ingin diungkapkan akan melahirkan pengetahuan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup>Man Arfa, "Partisipasi Buruh Pelabuhan Makassar dalam Perjalanan Sejarah Sulawesi Selatan 1945 - 1973," (Ujung Pandang : Fakultas Sastra, Skripsi Tahun 1991, hal. 6.

<sup>10)</sup>Abd. Latif, "Pemahaman Dasar Tentang Sejarah," Makalah Yang disampaikan pada Seminar Peranan Sejarawan dan Arkeologi Terhadap Pembangunan Bangsa pada tanggal 27 Desember 1989, (Tamalanrea : Universitas Hasanuddin), hal. 2.

Sejarah Palang Merah Indonesia adalah sejarah perjuangan, baik perjuangan dalam konteks kemanusiaan maupun perjuangan dalam konteks nasionalisme. Dalam hal ini kelahiran PMI tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, mengusir penjajah yang telah begitu lama merampas dan menindas kemerdekaan manusia dan Bangsa Indonesia.<sup>11)</sup>

Berbicara tentang gerakan Palang Merah Indonesia khususnya dalam periode 1945 - 1992, tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukannya, diantaranya pada jaman kemerdekaan RI, membantu para korban perang baik yang terluka maupun yang meninggal, membantu memberikan obat-obatan, mendirikan rumah-rumah darurat bagi korban keganasan DI/TII dan Westerling dalam tahun 1965. Selain itu juga mendirikan dapur umum kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam, yaitu ketika banjir besar yang melanda Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1987 yang menelan korban yang tidak sedikit, baik nyawa maupun materi.

Demikian halnya dengan tulisan ini, penulis mencoba menggunakan teori-teori ilmu sosial yang tentunya berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Palang

---

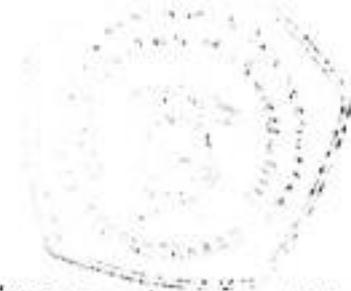
11) Hadi Supeno, "Pengakuan Pemerintahan dan ICRC," Suara PMI, Edisi 34/November 1995, hal. 16.

Merah Indonesia. Hal ini penulis lakukan karena secara menyeluruh penggunaan teori ilmu sosial dalam sejarah akan meningkatkan produktivitas karya sejarah dan akan menghasilkan karya bercorak deskriptif naratif. Faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan eksponen dan komponennya dari proses sejarah dapat dikaji secara cermat.<sup>12)</sup> Untuk merekonstruksi permasalahan ini yang tentunya menerangkan kejadian secara sistematis tentang ketiga faktor di atas serta unsur-unsur didalam proses yang dikaji, maka penulis padukan dengan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parson yang menganggap masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan (equilibrium). Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Jadi masyarakatlah yang merupakan produk dari proses interaksi individu-individu (teori interaksi dari Simuel 1858-1918).<sup>13)</sup> Kedua teori ini merupakan pelengkap didalam menganalisa proses

---

12) Sartono Kartodirdjo, "Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah," (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hal. 2.

13) Ir. M. Munandar Soelaeman, "Ilmu Sosial Dasar," (Bandung: PT. Eresco, 1989), hal. 30-31.



sejarah yang dikaji yang pada akhirnya dapat dihasilkan suatu kajian sejarah yang sifatnya kronologis.

Dalam kaitannya dengan kajian ini, didalam kehidupan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan tentunya terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman. Kemunculan korps sukarela dan palang merah remaja yang adalah hasil dari pembinaan generasi muda yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia telah membawa dampak positif dikalangan remaja dan pemuda Indonesia. Wadah yang terdiri dari generasi muda ini yang adalah bagian dari PMI dimana anggota-anggotanya dididik menjadi manusia yang berperikemanusiaan, disiapkan sebagai kader yang baik dan mampu membantu melaksanakan tugas kepalangmerahan. Selain itu mereka juga dibekali oleh berbagai keterampilan khususnya dalam menanggulangi berbagai bencana, baik didarat maupun di laut. Kesemuanya itu akan tergambar pada uraian selanjutnya yang tentunya sesuai dengan obyek-obyek kajian ini.

Dalam upaya merekonstruksi untuk mendapat obyek aktivitas, maka diperlukan metode yang mantap yang sesuai dengan kajian sejarah. Metode sejarah dapat diartikan sebagai proses menghasilkan untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan masa lampau, secara analisis kritis yang meliputi usaha sintesa agar

menjadikan penyajiannya dapat dipercaya. Dengan demikian metode sejarah bertujuan untuk memastikan dan mengatakan kembali fakta yang ditinggalkan masa lampau.<sup>14)</sup> Dalam proses metode sejarah dikenal empat tahapan, yaitu : 1. Heuristik (Pengumpulan sumber). 2. Kritik sumber. 3. Interpretasi (Penafsiran). dan Historiografi (Penulisan Sejarah).

Heuristik merupakan langkah awal dari kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan sumber-sumber, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan oleh penulis yang berupa arsip yang berhubungan dengan kajian ini. Sedangkan sumber sekunder berupa buku, brosur, buklet, artikel serta makalah yang dimiliki Markas Besar Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan. Dan untuk melengkapi sumber-sumber yang diperoleh maka penulis mengambil data dengan mewawancarai orang-orang tertentu yang banyak tahu tentang kepalangmerahan, utamanya tokoh yang terlibat langsung dalam kepalangmerahan Indonesia di Sulawesi Selatan.

---

14) Hugiono dan Poerwantara, "Pengantar Ilmu Sejarah," (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 40. Bandingkan pula Louis Gotschalk, "Mengerti Sejarah," (Jakarta: University Indonesia Press, 1986), hal. 32.

Hasil pengumpulan sumber tersebut selanjutnya diseleksi atau dianalisa untuk mendapatkan kredibilitas yang dapat menuntun daya imajinasi kesejarahan yang memungkinkan untuk memasuki kelampauan agar dapat dimengerti dan dimemunculkan kembali.<sup>15)</sup>

Keterangan dan data yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan melalui kegiatan Heuristik masih merupakan bahan baku yang siap pakai, olehnya itu harus memasuki tahap pengolahan yang disebut kritik sumber.<sup>16)</sup> Sistem pengolahan itu diawali dengan penetapan otentisitas dan kredibilitas sumber yang dilakukan melalui proses kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern menyangkut dokumen-dokumen yang berupa arsip, buku-buku dan artikel terutama dalam hal ini mengenai huruf dari naskah sebagai sumber yang sesuai dengan zamannya. Sedangkan kritik intern menyangkut tentang isinya.

Langkah ini ditempuh mengingat bahwa setiap keterangan tidak luput dari sumber subyektifitas baik

---

15) Taufik Abdullah, "Sejarah Lokal di Indonesia," (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hal. 4.

16) Edward L. Poelinggomang, "Sumber dan Kritik Sejarah", makalah yang disampaikan pada kegiatan acara Pelatihan Sejarah Sekota Madya Ujung Pandang pada tanggal 20 Juni 1992, Universitas Hasanuddin, hal. 4.

dari penuturnya atau penulisnya, dengan harapan agar dalam mengungkapkan tulisan ini tidak keluar dari pokok permasalahan.

Selanjutnya merumuskan pernyataan tentang bukti yang tidak diseleksi dan kemudian melakukan interpretasi terhadap pernyataan dalam hal ini bahwa penulis berusaha untuk seobyektif mungkin. Meskipun masa silam tidak mungkin diamati secara langsung, namun pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang disusun melalui kerangka interpretasi imajinatif dapat menolong para sejarawan untuk merekonstruksi suatu kejadian itu sendiri.

Sebagai langkah terakhir adalah menuangkan dalam bentuk tulisan atau seluruh data dan fakta yang biasa disebut proses historiografi (penulisan sejarah). Dengan melalui sejarah diharapkan mampu mengungkapkan secara obyektif akan misi yang diemban oleh Palang Merah Indonesia di Sulawesi Selatan.

## BAB II SULAWESI SELATAN

### 2.1 Masa Awal Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan ke seluruh dunia oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, terjadi tepat pada saat adanya kevakuman kekuasaan di Indonesia. Karena Jepang di tahun 1942 berhasil menaklukkan pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia dan melanjutkan penjajahan, takluk pada sekutu pada tanggal 14 Agustus sebagai akibat jatuhnya bom oleh Amerika di Hiroshima. Sehingga dengan demikian, kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh Bangsa Indonesia sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu tercapai yang bermakna pula Bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan berhak serta berkewajiban mengatur dirinya sendiri.<sup>1)</sup>

Setelah kemerdekaan diraih dan pada babakan selanjutnya akan dipertahankan, Indonesia berada dalam suasana revolusi fisik antara tahun 1945-1949. Sulawesi Selatan ketika itu masih bernama Makassar merupakan suatu

---

<sup>1)</sup> Andi Sapada, "Peranan TRI Resimen Hasanuddin dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI di Sulawesi Selatan," Makalah yang disampaikan pada Seminar Sejarah Makassar oleh Mahasiswa Sejarah Fakultas Sastra pada tanggal 7 November 1992, (Tamalanrea: Universitas Hasanuddin), hal. 1.

daerah, tempat di luar republik yang paling hebat menentang pengembalian kekuasaan Belanda dan sekaligus menjadi markas besar negara yang paling berkembang di antara negara-negara federal yang disponsori oleh Belanda.

Pada saat Jepang menyerah, maka pasukan Australia sudah berada di pangkalang depan Morotai Maluku Utara. Pasukan ini oleh komandan Asia Tenggara pada tanggal 13 Agustus 1945 ditugasi untuk mengambil alih tanggung jawab sementara atas Kalimantan dan Indonesia Timur sampai mereka dapat digantikan oleh pasukan Inggris.

Sementara itu pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian ketika Letnan Gubernur Dr. Hubertus J. Van Mok yang telah tinggal di Australia selama perang dan karenanya dengan mudah dapat diatur agar pejabat NICA menyertai pasukan Australia ketika mereka mendarat di Indonesia Timur. Namun sebelum kedatangan pasukan Australia, Mayor Gibson yang ditunjuk sebagai wakil sekutu telah menemui Gubernur Republik untuk Sulawesi, Dr. Ratulangi untuk minta bantuan guna memelihara hukum dan ketertiban. Dr. Ratulangi menerima permintaan ini dan memberi tugas untuk memelihara ketertiban di Makassar sampai mendaratnya pasukan Australia, walaupun diantara pemuda-pemuda Makassar pada saat itu mencegah pendaratan tersebut.

Sesuai dengan rencana, maka rombongan pasukan Australia yang pertama tiba di Makassar tanggal 21

September 1945 merupakan barisan pelopor sedangkan rombongan berikutnya mendarat pada tanggal 23 September 1945 sempat memboncengi para pejabat NICA.

Pada tanggal 2 Oktober 1945 terjadi insiden tembak-menembak yang dimulai oleh pasukan KNIL selama tiga hari dalam kota Makassar. Kemudian terjadi lagi tanggal 15 Oktober 1945. Disinilah komandan pasukan Australia Brigadir Doherty memerintahkan agar pasukan KNIL dikurung di barak-baraknya. Doherty memang berusaha mempertahankan realitas dan tidak mencapuri situasi setempat dan Doherty kemudian digantikan oleh Brigadir F. O. Chilton pada tanggal 19 Oktober 1945 yang kedatangannya bersamaan dengan kebijaksanaan Australia serta tekad untuk melaksanakan dan menjalankan pengendalian di pedalaman Sulawesi dan sebagian untuk menjamin persediaan beras untuk kota Makassar.

Untuk merealisasikan akan kebijaksanaan tersebut dan atas desakan para pejabat NICA, pada tanggal 20 Oktober 1945 Brigadir Chilton setuju mengirim beberapa batalion guna menduduki wilayah-wilayah terpenting di Bone dan Bonthain serta memerintahkan pasukannya membantu para pejabat NICA dalam memerintah wilayah-wilayah itu. Namun pada tanggal 28-29 Oktober malam, oleh sekelompok besar pemuda dipimpin oleh PPNI menyerang kedudukan NICA di dalam kota. Mereka merebut dua stasiun radio dan menurunkan bendera Belanda di depan gedung kantor

pemerintahan dan menggantikannya dengan bendera Republik Indonesia yakni Merah Putih. Mereka juga menyerang barak polisi dan hotel setempat dimana para pejabat NICA bertempat tinggal. Pada saat itu NICA tidak sanggup mengatasi serangan-serangan itu sehingga meminta bantuan dari pasukan Australia.

Kehadiran Belanda di Makassar semakin diperkuat ketika Markas Besar NICA pindah dari Morotai ke Makassar pada saat pasukan Inggris (brigade kedelapan puluh) menggantikan pasukan Australia pada tanggal 1 Pebruari 1946. Pasukan Belanda termasuk satuan-satuan KNIL yang dihimpun kembali telah memikul tanggung jawab untuk memelihara hukum dan ketertiban.

Sekalipun tawanan perang Sekutu di Sulawesi semuanya telah diungsikan pada waktu itu sebagian besar pasukan Jepang masih ada. Barulah setelah evakuasi Jepang selesai pada bulan Mei dan Juni 1946 kekuasaan atas pulau-pulau luar Jawa secara resmi dialihkan dari komandan Asia Tenggara kepada Pemerintah Hindia Belanda. Ini terjadi pada tanggal 14 Juni 1946, sehingga pasukan Inggris bertolak ke India pada bulan Agustus 1946.<sup>2)</sup>

Sampai bulan Desember 1946, Belanda belum berhasil menguasai daerah-daerah pedalaman meskipun kota-kota di

---

<sup>2)</sup>Departemen Dalam Negeri di Propinsi Sul-Sel, "Sejarah Perkembangan Pemerintahan Sul-Sel," 1991, hal. 262-265.

Sulawesi Selatan seluruhnya telah dikuasai. Oleh sebab itu Belanda merasa perlu memberlakukan Undang-Undang Keadaan Bahaya Perang.

Agar UUKB tersebut seolah-olah diberlakukan atas kemauan rakyat Sulawesi Selatan dan bukan kehendak Belanda, Dr. C. L. Cachet mengadakan pertemuan dengan para "bonekanya". Pertemuan ini mereka namakan Pertemuan Hadat Tinggi, berhasil menelorkan pernyataan, "Demi ketentraman dan ketertiban, Pertemuan Hadat Tinggi mendesak Letnan Gubernur Jenderal Van Mook agar membatasi kaum ekstremis yang sedang mengganas".

Atas kedok pernyataan itu, tanggal 14 Desember 1946, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengeluarkan keputusan memperlakukan UUKB pada 4 afdeling dalam Wilayah Sulawesi Selatan, yaitu :

- 1). Afdeling Makassar (sekarang : Kota Madya Ujung Pandang, Kab. Gowa, Takalar, Je'nepono, Maros dan Pangkep).
- 2). Afdeling Pare-Pare (sekarang : Kodya Pare-Pare, Kab. Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Enrekang).
- 3). Afdeling Mandar (sekarang : Mamuju, Maje'ne dan Polewali Mamasa).
- 4). Afdeling Bonthain (sekarang : Bantaeng, Bulukumba, Selayar dan Sinjai).

Didalam melakukan operasi atas nama UUKB, ada beberapa daerah yang dianggap berat oleh Westerling.

Kekuatan gerilyawan bertumpuk pada dukungan rakyat dengan bantuan logistik. Perlawanan yang diakui di daerah Polombangkeng dan Barru, karena daerah ini merupakan daerah pendaratan kelompok ekspedisi. Berdasarkan perhitungan tersebut, Westerling berusaha memotong pengaruh gerilyawan terhadap rakyat dengan jalan :

1. Mengadakan semacam blokade ekonomi, penduduk di desa-desa yang letaknya terpencil diusir dengan kekerasan. Lebih-lebih jika desa yang bersangkutan kaya dengan persawahan dan perkebunan. Penduduk disatukan dengan perkampungan tertentu yang diawasi dengan ketat, semua bahan makanan yang harus dikumpulkan dalam perkampungan tertentu. Untuk memudahkan pengawasan, letak perkampungan dipilih yang dekat dengan pasukan. Jika masih terjadi perlawanan, maka kepala kampung dihukum mati.
2. Menciptakan situasi panik dan ketakutan secara massal dengan jalan membakar kampung dan rumah-rumah penduduk, disertai pembunuhan massal di tempat-tempat umum dan interogasi yang menyolok mata.

Untuk mencapai tujuan operasi, di daerah yang masuk dalam wilayah dalam keadaan darurat perang, Westerling melakukan gerakan cepat disertai tindakan yang biadab di luar batas-batas perikemanusiaan. Di Pare-Pare misalnya, semua pejuang yang sudah ditangkap dan dititip di rumah penjara sebagai tahanan untuk diproses secara hukum

melalui pengadilan, dikeluarkan lalu digiring ke terminal angkutan umum. Disinilah dihajar secara demonstratif di hadapan ribuan pasang mata rakyat yang dipaksa menonton, Westerling menembak para penjuang yang tak berdaya sampai mati. Tokoh-tokoh pejuang seperti, Andi Abdullah Bau Masepe Datu Suppa Lolo, Usman Isa, Andi Makkasau, Andi Sulolipu, La Halede, Andi Muis, Pabbicara Langriseng, Andi Abubakar, Andi Mukka Dg. Paroni, semuanya fungsionaris BPRI (Badan Perjuangan Republik Indonesia) Pare-Pare, dihukum mati tanpa melalui proses pengadilan. Mayat mereka dimakamkan secara tersembunyi oleh pasukan Westerling.<sup>3)</sup>

Akibat dari keganasan Westerling terhadap penduduk Sulawesi Selatan, TRI Resimen Hasanuddin yang didalamnya sudah ada terlibat dalam kegiatan kepalangmerahan sejak berdirinya 17 September 1945 membantu para pejuang dengan memberikan pertolongan berupa obat-obatan, membantu masyarakat dalam menyediakan dapur umum walaupun dalam persediaan yang sangat terbatas disebabkan oleh kondisi yang serba sulit.<sup>4)</sup> Namun demikian perjuangan dalam mempertahankan Kemerdekaan RI di Sulawesi Selatan tetap berkelanjutan hingga saat penyerahan kedaulatan dari

---

3) Andi Sapada, op. cit, hal. 8 - 9.

4) Putra Bakhtiar Barrang, Wawancara, tanggal 3 Maret 1997.

tangan Belanda ke RIS tahun 1949 sesuai dengan hasil Konperensi Meja Bundar.<sup>5)</sup>

## 2.2 Masa Republik Indonesia Serikat

Hasil konperensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949 menimbulkan dua pola pendapat politik di Sulawesi Selatan yaitu :

1. Golongan federalis antara lain A. Massarapi, AC. Manoppo Baoesat A. Baso, semuanya parlemen Negara Indonesia Timur. Ide federalis ini tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat banyak.
2. Golongan Unitaris yang jauh lebih besar jumlahnya yang terdiri dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan para pemuda pejuang.

Pada tanggal 5 - 7 Pebruari 1950 golongan Unitoris mengadakan konferensi di Polombangkeng, 30 km dari Makassar dan membentuk suatu wadah perjuangan yang disebut Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (Biro PPRI), mengambil resolusi yang isinya berintikan sebagai berikut:

1. Bubarkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Yogyakarta.
2. Datangkan Tentara Nasional untuk menjaga keamanan di Sulawesi Selatan.

---

5) L o c . c i t ., hal. 13.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 1950 di Makassar terbentuk Panitia Demonstrasi keinginan rakyat dibawah pimpinan Yusuf Bauty dan R.S. Cesman dengan melancarkan suatu demonstrasi di Makassar yang melibatkan  $\pm$  200.000 peserta dengan tuntutan :

1. Bubarkan Negara Indonesia Timur, dan
2. Tentara Nasional Indonesia supaya segera didatangkan ke Sulawesi Selatan dari Jawa.

Resolusi disampaikan oleh wakil demonstiran A.N. Hajarati kepada Presiden Negara Indonesia Timur Husein P. Limboro.

Kemudian pada tanggal 26 April 1950 di Makassar terbentuk Proklamasi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Dewan Sulawesi Selatan. Hal ini dikemukakan (dalam sejarah Perkembangan Pemerintahan Sulawesi Selatan, 1991 : 306) seperti berikut :

"Sesuai dengan keinginan tersebut dari seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang dilahirkan dengan demonstrasi, mosi, statemen tanggal 20 Maret 1950 dari Panitia Penegak Republik Indonesia yang meliputi lebih dari 50 partai politik dan organisasi masyarakat, maka mulai hari ini tanggal 26 April 1950 Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Dewan Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Sulawesi Selatan melepaskan diri dari Negara Indonesia Timur dan masuk dalam Republik Indonesia sebagai suatu propinsi. Kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia kami mendesak, agar supaya pernyataan kami dengan selekas-lekasnya disahkan."

Proklamasi tersebut ditandatangani oleh :

1. Andi Idjo Karaeng Lalolang, Ketua Pemerintah Sulawesi Selatan
2. Andi Mappatoba, anggota
3. Andi Tjalla Daeng Muntu, anggota
4. Andi Burhanuddin, Ketua Dewan Sulawesi Selatan.

Untuk penggalangan lebih lanjut semangat rakyat dalam membubarkan Negara Indonesia Timur, maka pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 1950, atas inisiatif Biro PPRI dilangsungkan Kongres Rakyat Indonesia Timur di Makassar dengan sebuah resolusi yang menetapkan berdirinya suatu sekretariat Kongres yang merupakan seluruh suara rakyat serta memperjuangkan suara tersebut sebagaimana mestinya.

Sebagai kelanjutan dari Proklamasi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, maka dibentuklah suatu Pemerintah Darurat Republik Indonesia khusus untuk Sulawesi Selatan Tenggara yang tersusun sebagai berikut :

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ince Saleh Daeng tompo    | - Kepala Daerah           |
| 2. Abdul Salam Daeng Masikki | - Badan Pemerintah Harian |
| 3. Yusuf Bauty               | - Badan Pemerintah Harian |
| 4. Chaeruddin Syahadat       | - Badan Pemerintah Harian |
| 5. Parjo                     | - Badan Pemerintah Harian |

Kemudian Pemerintah Darurat I mulai berfungsi pada tanggal 24 Juni 1950, bersama dengan Daeng Acting Gubernur



Sulawesi B.W. Lapien dan panglima Perang Indonesia Timur Kolonel Ae. Kawilarang menghadapi peristiwa penyelesaian gerilya Kahar Muzakkar.

Di tengah-tengah usaha penyelesaian inilah terjadi keretakan politik antar Kepala Daerah Inche Saleh Daeng Tompo dengan anggota Badan Pemerintah Harian Yusuf Bauty, dimana Kepala Daerah menuduh Yusuf Bauty melakukan penggelapan atas sejumlah gula pasir yang disediakan untuk para gerilya yang masuk di rayon-rayon yang telah ditentukan. Kemudian Yusuf Bauty diberhentikan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan bersama Sofyan Sunari diperiksa oleh Kejaksaan dengan tuduhan penggelapan.

Munculnya mosi tidak percaya yang tidak dapat dielakkan lagi yang kemudian menjatuhkan seluruh Pemerintah Darurat I Sulawesi Selatan.

Kemudian disusun dengan terbentuknya Pemerintah Darurat II Sulawesi Selatan dengan susunan sebagai berikut :

1. H. Andi Patoppoi sebagai Kepala Daerah
2. Nurdin sebagai anggota Badan Pemerintahan Harian
3. Abdul Kadir sebagai anggota Badan Pemerintahan Harian
4. Drs. Ince Zainuddin Ali sebagai anggota Badan Pemerintahan Harian
5. Massiara sebagai anggota Badan Pemerintahan Harian.

Pemerintah Darurat II Sulawesi Selatan ini tidak sampai berfungsi sebagaimana mestinya karena waktunya

sangat singkat memerintah. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 15 Agustus 1950, sejak itu pula berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Rpublik Indonesia dan Negara Indonesia Timur dianggap bubar dan terpecah menjadi tiga propinsi, yaitu :

1. Propinsi Sunda kecil
2. Propinsi Sulawesi
3. Propinsi Maluku.<sup>6)</sup>

### 3.3 Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia

Periode pemerintahan ini dimulai dengan pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggantikan Negara Republik Serikat. Demikian pula dengan pernyataan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1945.

Seperti juga dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Sementara yang pernah berlaku sebelumnya, maka Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 ini juga menyatakan tetap berlakunya segala ketentuan yang ada sepanjang belum dicabut ditambah atau diubah berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Pasal 142 Undang-

---

6) I b i d., hal. 306, 307, 308.

Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (dalam sejarah perkembangan Pemerintah Sulawesi Selatan 1991 : 319) berbunyi sebagai berikut :

"Peraturan-peraturan, Undang-Undang dan ketentuan tata Usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah dengan Undang-Undang Dasar ini."

Hal ini menunjukkan, bahwa ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pemerintah di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya tetap berlaku. Demikian halnya dengan ketentuan-ketentuan tentang Swapraja, Neo Swapraja, Daerah Selebes Selatan, Komisariat Negara dan lain-lain tetap berlangsung terus sampai ditetapkannya ketentuan yang baru.

Salah satu hal yang penting dalam Pemerintahan di Sulawesi Selatan ialah adanya kenyataan, bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terbentuk pula Propinsi Administratif Sulawesi sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 Tahun 1950.<sup>7)</sup>

Setelah Indonesia kembali dibentuk negara kesatuan Republik Indonesia, stadsgemente atau hamente Makasaar

---

7) I b i d., hal. 319.

atau Kota Makassar. Dalam laporan-laporan politik Makassar 1953 dan sesudahnya biasa ditulis Kota Besar Makassar.<sup>8)</sup>

Mengenai Gowa yang wilayahnya adalah termasuk dalam lingkungan wilayah Makassar dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 (Lembaran Negara No. 48 Tahun 1952) jo Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1953 (Lembaran Negara No. 2 Tahun 1953) Pemerintah Daerah Makassar tidak dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif disebabkan pertentangan politik yang menghebat yang menghendaki agar Gowa tersebut selekas-lekasnya dikeluarkan dari lingkungan kekuasaan Daerah Makassar dan dibentuk menjadi daerah otonomi tersendiri.

Bahwa untuk dapat mengatasi pertentangan-pertentangan politik itu demi mengingat kepentingan rakyat serta untuk segerah melancarkan jalannya pemerintahan di daerah satu sama lain bertalian dengan usaha-usaha pemerintah untuk mengembalikan keamanan, dipandang perlu sambil menanti berlakunya undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh daerah Indonesia, membubarkan Daerah Makassar dan membentuk Gowa, Maros, Pangkajene dan Jeneponto, Takalar masing-masing sehingga

---

8) Dr. Mukhlis, dkk. "Sejarah Kota Besar Makassar/Kota Madya Ujung Pandang 1950 - 1970," (Ujung Pandang: 1985). hal. 65.

"Daerah" dimaksud dalam Undang-Undang dan Negara Indonesia Timur No. 44 Tahun 1950.<sup>9)</sup>

Suatu hal yang perlu diketahui bahwa disamping pemerintahan gemeente Makassar, baik pada masa stadsgemeente maupun neo-stadsgemeente terdapat pula pemerintahan Afdeeling Makassar yang membawahi beberapa onder afdeling dan swapraja.

Dalam Bulan September dan Oktober 1950 organisasi politik dan organisasi massa menuntut penghapusan swapraja, diganti dengan sistem kedaulatan rakyat. Mereka mengharapkan agar supaya anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari wakil-wakil dari organisasi politik, dan Walikota dipilih oleh DPRD.

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotapraja Makassar dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari 1952, ketika itu Acting Gubernur Lopian telah digantikan oleh Gubernur Sudiro. Sesuai dengan ketentuan, anggota DPRD Kotapraja Makassar berjumlah 25 orang dengan perincian sebagai berikut:

- |            |         |
|------------|---------|
| 1. Masyumi | 7 Kursi |
| 2. PKR     | 4 Kursi |

---

<sup>9)</sup>Arsip Pemerintahan Daerah Makassar, Daerah Swatantra Makassar 1958 - 1959, Koleksi Perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia, 1950 - 1960 Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Ujung Pandang, No. Reg. 206.

3. Partai Katholik	3 Kursi
4. LISS	2 Kursi
5. Parkindo	2 Kursi
6. LIM	1 Kursi
7. PSII	1 Kursi
8. Partai Buruh	1 Kursi
9. PARINDRA	1 Kursi
10. PSI	1 Kursi
11. Pemuda Demokrat	1 Kursi
12. PIR	1 Kursi

---

Jumlah

25 Kursi

Dari hasil sidang DPRD tersebut, diajukanlah empat orang calon walikota. Setelah Menteri Dalam Negeri menetapkan salah satu diantaranya, maka pada tanggal 30 Juni 1952 Gubernur Propinsi Sulawesi Ahmad Dara Syahrudin sebagai Walikota Makassar. Disamping pemilihan walikota diadakan juga pemilihan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) yaitu semacam Badan Pemerintahan Harian (BPH) beranggotakan empat orang dimana walikota sebagai ketua merangkap anggota.

Jumlah anggota DPRD Kotapraja Makassar yang sejak tahun 1952 sebanyak 25 orang itu, dalam tahun 1957 meningkat menjadi 35 orang. Ini sebagai akibat daripada

peningkatan dan perkembangan penduduk serta organisasi politik dan organisasi massa ketika itu.

Kegiatan DPRD Kotapraja Makassar lainnya ialah membuat rancangan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Daerah mengenai pajak dan pungutan lainnya, perizinan, kesejahteraan dan ketertiban. Dalam sidangnya pada tanggal 5 Mei 1953 dibicarakan dan diputuskan pula tempat lambang Kotapraja Makassar.

Berlakunya Undang-undang Dasar Sementara 1950 membawa akibat pengaruh sistem Liberal mewarnai kehidupan politik di Kota Makassar. Dalam situasi ini keinginan pribadi sering mempengaruhi kelompok atau organisasinya. Berbagai pernyataan/resolusi/mosi diajukan oleh partai politik dan organisasi massa pada pemerintah untuk memenangkan konsep-konsep politiknya. Dapat dilihat antara lain pernyataan dari Panitia Penuntut Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Januari 1953 yang menyoroti Gubernur Sulawesi. Mosi tidak percaya tanggal 26 Oktober 1953 dari tiga anggota DPRD Kotapraja Makassar yang tidak percaya lagi kepada ketuanya sendiri dan banyak lagi pernyataan lainnya. Namun diantaranya ada pula yang mengarah kepada kepentingan umum seperti usul dari 11 partai politik pada tanggal 15 Maret 1953 untuk membentuk daerah otonom Propinsi Sulawesi Selatan.

Suhu politik yang tidak menentu dalam periode ikut pula mempengaruhi ketertiban masyarakat, lebih-lebih pada saat-saat pemilihan umum pertama di Indonesia.

Bagaimanakah hasil pemilu dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik dan pemerintahan di Kota Besar Makassar tidak jauh berbeda dengan keadaan umum politik di negara kita sesudah pemilu tersebut. Konstituante hasil pemilu tersebut sebagai lembaga legislatif tertinggi dari negara ketika itu, tidak dapat menyelesaikan tugasnya terutama dalam merumuskan undang-undang dasar negara. Situasi ini menimbulkan golongan atau kelompok yang tidak puas terhadap pemerintah. Ada tanggapan yang timbul bahwa seolah-olah pemerintah pusat tidak memperhatikan daerah, sehingga menimbulkan ketegangan, untuk sementara waktu ketegangan antara pusat dan daerah dapat diredakan dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).<sup>10)</sup>

Suatu pergolakan yang sangat penting dan sungguh meresahkan penduduk Sulawesi Selatan ketika DI/TII melaksanakan aksinya dengan membakar rumah-rumah penduduk. Sejak awal dari gerakannya tahun 1950, DI/TII dibawah pimpinan Kahar Muzakkar terjadi konflik dengan pasukan ABRI dimana mendapat dukungan dari kalangan bangsawan<sup>11)</sup>

---

10) o p. c i t., hal. 83 - 87.

11) Anhar Gonggong, "Abdul Gakhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak," (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 19 ), hal. 109.

yang diakibatkan terjadinya pertempuran. Tugas PMI ketika itu bagi masyarakat yang tertimpah bencana akibat pertempuran, memberi pertolongan kepada kedua belah pihak dengan mensuplai bahan makanan dan obat-obatan. Peristiwa itu terjadi di Daerah Mamasa, Enrekang dan Luwu, utamanya padapelaksanaan operasi kilat yang dipimpin oleh Brigjen Solihin antara tahun 1955 - 1964.<sup>12)</sup>

Sebagai rangkaian daripada pergolakan-pergolakan politik yang terjadi di Sulawesi Selatan yang berpusat di Kota Makassar, pada tanggal 2 Maret 1957 lahir suatu golongan yang menamakan gerakannya "Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)". Golongan ini dengan dalih memperjuangkan daerah, bertindak memaksa dan melawan Pemerintah RI, karena itu dinyatakan sebagai suatu pemberontakan.<sup>13)</sup>

Dalam kemelut politik itu, disaat-saat berlakunya SOB 14 Maret 1957, Ahmad Dara Syahrudin, meminta dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Walikota Kotapraja Makassar. Atas permintaan tersebut, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Daeng Rani mengangkat M. Junus Daeng Mile sebagai Acting Walikota Makassar (1957 - 1959).<sup>14)</sup>

---

12) Putra Bakhtiar Barrang, Wawancara pada tanggal 4 Maret 1997.

13) L o c . c i t ., hal. 88 - 89

14) I b i d ., hal. 91

Suatu peristiwa yang sangat penting dan perlu digaris bawahhi dalam kehidupan konstitusional negara kita dalam pertengahan tahun 1959 ialah dengan keluarnya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15)</sup>

Pada tahun 1959, Walikota Makassar M. Yunus Daeng Mile digantikan oleh Abdul Razak Daeng Massikki. Kemudian pada tahun 1962 Abdul Razak Daeng Massikki digantikan oleh Haji Arupala yang memangku jabatannya sampai bulan Mei 1965. Dalam periode jabatan kedua walikota ini, sekitar tahun 1960-an sampai tahun 1964, atas dasar keputusan dan ketetapan MPRS Nomor 1/MPRS/1960 dilakukan sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan politik nasional yang juga digalakkan pelaksanaannya di kota Makassar, yakni kegiatan-kegiatan indoktrinasi mengenai pemahaman Pancasila, UUD 1945, Ketetapan-Ketetapan MPRS dan Manifesto Politik (Manipol) yang merupakan GBHN ketika itu.<sup>16)</sup>

Mengenai anggota-anggota DPRD kota Makassar dalam tahun 1961 sampai 1966 yang mana tercatat sebanyak 52 orang yang pernah duduk sebagai anggota dewan dari 26 fraksi (lihat lampiran : ).

---

15) I b i d., hal. 92 - 93

16) I b i d., hal. 95.

Pada bulan Mei 1965, H.M. Daeng Patompo diangkat menjadi Walikota Makassar menggantikan Haji Arupala. Dalam tahun 1965 ini kembali terguncang hebat dengan dilakukannya suatu usaha makar yang biadab oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan G.30.S-nya. Gerakan ini dalam waktu singkat berhasil ditumpas, namun eksekusinya masih berlanjut. Peristiwa tragis ini pengaruhnya sampai ke daerah-daerah termasuk di kota Makassar, timbul berbagai aksi dan demonstrasi massa yang mengutuk gerakan tersebut, pengganyangan anggota PKI dan menuntut dibubarkannya PKI. Suhu politik dan luapan emosi kemarahan rakyat di Kota Makassar ketika itu hampir-hampir tidak terkendali. Bagi M. Daeng Patompo, peristiwa dan eksekusinya ini merupakan salah satu ujian kepemimpinan dalam awal-awal periode jabatannya sebagai Walikota Kotapraja Makassar.<sup>17)</sup>

### 3.4 Masa Orde Baru

Dalam periode 1965-1971, Makassar tetap sebagai nama kota perdagangan dan perdagangan transito. Namun Ibukota Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan.<sup>18)</sup>

---

17) I b i d., hal. 96.

18) "Ikhtisar Masalah Segi Sejarah," Kumpulan Makalah Dalam Seminar Makassar, (Ujung Pandang : Yayasan Intim, 1981), hal. 12.

Telah dimaklumi, bahwa menjelang tahun 1966 terjadi dua peristiwa besar dalam sejarah Tanah Air yang besar pengaruhnya dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yakni :

1. Berhasilnya ditumpas pemberontakan gerombolan DI/TII Kahar Muzakkar pada Bulan April 1965.
2. Terjadinya gerakan 30 September (G 30 S/PKI) yang dapat ditumpas dalam waktu singkat oleh ABRI dan rakyat.

Kedua penumpasan itu sungguh sangat besar artinya dalam stabilitas dan dinamika pembangunan bangsa. Seperti halnya bagi pemerintah dan rakyat Kota Makassar, sudah dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembangunan daerahnya.

Tahun 1966 merupakan suatu awal babakan baru dalam sejarah Kota Makassar. Kota mulai dibenahi dan ditata secara sungguh-sungguh.<sup>19)</sup>

Organisasi dan sistem mekanisme pemerintahan ini mengalami perubahan pada tahun 1967, dengan keluarnya instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 1967. Berdasarkan instruksi Presiden ini, pemerintah Kotapraja Ujung Pandang mengadakan semacam integrasi unit urusan-urusan pemerintahan umum dengan urusan-urusan pemerintahan otonom

---

19) o. p. c i t., hal. 96 - 97.

ke dalam Pemerintah Daerah Kotamadya Makassar, sehingga menjadi suatu integrasi staf unit.<sup>20)</sup>

Dalam kerangka organisasi administratif, penyediaan biaya adalah faktor penting dalam tingkah laku Kotapraja. Di Indonesia dalam tahun-tahun sejak 1965 telah tercapai suatu stabilitas politik yang relatif mantap, dan hal ini memungkinkan bagi berbagai kesatuan administratif untuk memulai suatu pekerjaan perencanaan jangka panjang. Namun kesukaran keuangan dalam perencanaan jangka panjang di Makassar adalah besar.

Sebagai suatu Kotamadya, Makassar tidak mempunyai banyak sumber untuk meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu kota ini benar-benar amat tergantung pada penerimaan dari sumber-sumber Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi. Namun, dalam tahun-tahun sejak 1968 - 1969, sumber perpajakan kota telah benar-benar diperbesar dengan tambahan pajak perjudian dan sumbangan dari Pemerintah Pusat terhadap dana Kotapraja secara proporsional telah menjadi rendah, walaupun secara absolut tidak.<sup>21)</sup>

Landasan ideal Pembangunan Kotamadya Makassar adalah Pancasila itu sendiri dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah

20) I b i d., hal. 98.

21) W. Donald Mc Taggart, "Kebijaksanaan Pembangunan Kota di Indonesia: Kasus Ujung Pandang Sulawesi Selatan," Masyarakat Indonesia, No. 1 Tahun III 1976, hal. 82.

landasan Konstitusional, baik pembangunan itu berwujud fisik materil maupun bersifat mental spirituil, berjangka pendek maupun yang berjangka panjang.<sup>22)</sup>

Pola pembangunan lima tahun Kotamadya Makassar tahun 1965 - 1970 ini sebenarnya sudah ada sebelum pola pembangunan lima tahun (Pelita Nasional) lahir yang terkenal dengan program 3 K artinya bahwa Pola Pembangunan mempunyai sasaran-sasaran memberantas :

1. Kemiskinan
2. Kemelaratan
3. Kebodohan.

Maksud Pemerintah Kota disini ialah bahwa dengan terberantasnya 3 K tersebut maka berarti kita telah mencapai suatu peletakan Dasar yang fundamental untuk Tahaf Pembangunan selanjutnya.<sup>23)</sup>

Dalam tahun 1970-an terjadi kesepakatan untuk memperluas wilayah Kotamadya Makassar. Inisiatif itu diantisipasi oleh Jenderal Kemal Idris. Panglima Koanda IT. Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Lamo, juga mendukung kesepakatan itu. Untuk memperluas itu diperlukan kesepakatan para Kepala Daerah Gowa, Maros dan Pangkajene. Ketiga Kepala Daerah tersebut yang berpangkat

---

22) H. M. Dg. Patompo, "Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan," (Ujung Pandang : 1976), hal. 27.

23) I b i d., hal. 29.

militer Kolonel Angkatan Darat merasa keberatan untuk mengalihkan sebagian wilayahnya kepada Kotamadya Makassar, yang ketika itu menjadi Walikota H.M. Dg. Patompo, juga berpangkat Kolonel Angkatan Darat. Mereka bersedia menyerahkan wilayah untuk perluasan kepada Gubernur, kepada ibu negeri Propinsi Sulawesi. Nama Kotamadya Makassar harus diganti. Diusulkan dua nama, Kotamadya Makassar Raya, dan Kotamadya Ujung Pandang.

Dalam kalangan DPRD Kodya Makasaar, atas inisiatif anggota Dewan Hasan Osman, nama Ujung Pandang dimunculkan untuk menggantikan nama Makassar yang diperluas wilayahnya itu.<sup>24)</sup>

Dilihat dari segi prosesnya, maka sebenarnya dasar hukum dari perubahan tersebut adalah berdasarkan kepada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong "Kotapraja Makassar" tertanggal 24 September 1964 Nomor 29/DPRD GR/64, yang menetapkan pergantian nama menjadi Kotapraja "Ujung Pandang" berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 1965.

Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan utama masing-masing, yakni :

---

24) Mattulada, "What Is Name," Makalah Yang Disampaikan Pada Acara Diskusi Panel Makassar Bersinar, (Ujung Pandang: 1991). hal. 1 - 2.

1. Ujung Pandang adalah nama yang digunakan oleh Pahlawan Sultan Hasanuddin.
2. Bahwa apa yang dinamakan "Makassar" itu sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh orang atau penjajah Portugis dan Belanda, dikala menjajah negeri ini.
3. Bahwa umumnya penduduk Makassar dan Sulawesi Selatan banyak mengenal kota ini dengan nama Jumboandang, dari segi waktu maka pergantian nama dari sebutan "Makassar" menjadi "Ujung Pandang" membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu kurang lebih 7 tahun (5 September 1964 s/d 13 September 1971).<sup>25)</sup>

Perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971, yaitu pada Bab III, pasal 3 yang berbunyi Kotamadya Makassar sesudah diperluas daerahnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dirubah namanya menjadi Kotamadya Ujung Pandang.<sup>26)</sup>

---

25) Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan, "Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan," 1991, hal. 513.

26) Asmarani, "Perluasan Ibukota Propinsi Sul-Sel Dan Perubahan Namanya Menjadi Kotamadya Ujung Pandang," (Ujung Pandang : Biro Hukum Kantor Gubernur KDH Sulawesi Selatan, 1972), hal. 34.

Pemberian nama Ujung Pandang sebagai nama baru dari Kota Makassar merupakan salah satu rangkaian dan variasi perjalanan sejarah kota ini. Dalam periode ini pembangunan yang dilakukan merupakan proses persiapan menuju Repelita I.27)

---

27) Buku Kenangan Dirgahayu HUT Kotamadya Ujung Pandang ke-82, (Ujung Pandang : Yayasan Bina Terpadu), hal. 34.

# BAB III

## LATAR BELAKANG KESEJARAHAN

### PALANG MERAH

#### 3.1 Sejarah Lahirnya Palang Merah Internasional

Terbentuknya Palang Merah diawali oleh terjadinya peperangan antara Austria, Prancis dan Piedmont di Solferino Lombardia, Italia Utara. Peperangan ini terjadi pada tanggal 24 Juni 1859 dimana 40.000 manusia yang mati dan luka parah terbaring tanpa perawatan. Pelayanan kesehatan pada waktu itu belum begitu baik dan tentara yang menang hanya mempunyai 8.000 alat pembalut. Sementara rumah sakit dan para dokter tidak bisa berbuat banyak sebab mereka ikut tertawan bersama dengan tentara lainnya.

Dalam situasi berkecamuknya perang tersebut seorang pemuda dari Swiss bernama Henry Dunant tiba di dekat kota daerah tempat pertempuran dan mengamati pertempuran tersebut. Pada saat itu timbul ide dari Henry Dunant untuk memberikan suatu pertolongan kepada orang-orang yang terluka tersebut. Seketika itu juga ia bertindak dengan mengkoordinasikan bala bantuan untuk bekerja sama dengan penduduk setempat. Disitulah Henry Dunant merawat korban perang yang sakit dan terluka, tidak memandang lawan atau kawan, yang dilihat adalah bahwa mereka itu sebagai orang-

orang yang tidak berdaya dan menderita. Bahkan secara pribadi Henry Dunant merawat lebih dari 1000 tentara Italia, Austria dan Perancis.

Setelah tiga hari bergelut di medan perang dalam usahanya menolong orang-orang terluka, Henry Dunant memutuskan untuk mengubah jalan hidupnya. Ia mengalihkan perhatiannya dan menulis sebuah buku yang diberi judul : "Kenangan dari Selperino". Inti dari isi buku hasil tulisannya itu adalah bahwa disetiap negara harus didirikan badan pertolongan untuk orang yang terluka karena perang dan resmi diakui oleh pemerintah masing-masing.<sup>1)</sup>

Pada perkembangan selanjutnya buku karya Henry ini menarik perhatian masyarakat, diantaranya empat orang penduduk Jenewa, yakni Jenderal Doufour, Dr. Appia, Dr. Mavnoir dan ahli hukum Moynier. Mereka tertarik akan cita-cita Henry Dunant dan bergabung dengannya untuk mewujudkan gagasan kemanusiaan tersebut. Mereka berlima membentuk suatu komite pada tahun 1863 yang kelak dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah atau International Committee Of the Red Cross (ICRC). Kemudian pada tahun 1864 diselenggarakan suatu konperensi internasional di

---

<sup>1)</sup>Artikel dari DESPATCH, The Canadian Red Cross Quaterly, nr. 4 - 1966, hal. 18.

Jenewa yang membahas tentang perbaikan nasib tentara yang terluka di medan perang. Pada konperensi tersebut diresmikan lambang pelindung bagi para petugas/ penolong di medan perang, yaitu palang berwarna merah di atas dasar putih. Sementara itu komite tersebut telah memiliki banyak anggota sukarelawan. Ketika tahun 1870 meletus perang antara Prusia dan Perancis, mereka terjun ke medan perang merawat semua orang yang terluka tanpa diskriminasi.

Kemudian perang demi perang menyusul terjadi dan bila pertempuran usai, ICRC sebagai badan netral mengunjungi tawanan-tawanan militer atau penduduk sipil yang ditawan untuk memberikan bantuan dan perlindungan. Anggota keluarga yang terpisah akibat perang dipersatukan kembali melalui usaha Kantor Pusat Pencarian (Central Tracing Agency) yang tugasnya mencatat berbagai informasi yang masuk dan menyampaikan kepada keluarga tawanan dan keluarga orang yang hilang.

Beberapa dekade terakhir, aktivitas ICRC maasih berkembang dengan bantuan kepada orang-orang yang cacat akibat perang dan bantuan untuk orang sipil korban perang, selain menyebarkan Hukum Perikemanusiaan Intenasional.

Ketika Perang Dunia I berakhir, muncul berbagai macam epidemi penyakit yang berjangkit dan kelaparan menjalar di sebahagian negara di Eropa hingga menimbulkan ribuan

korban jiwa. Saat itu hampir tak ada badan internasional yang memberikan bantuan secara terkoordinir. Kemudian Henry P Davidson, warga negara Amerika, merasa perlu mendirikan suatu kesatuan yang menangani masalah bantuan tersebut yang dikenal dengan nama Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Dalam menjalankan misinya, Gerakan Kemanusiaan ini berpedoman pada tujuh prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang disahkan dalam Konperensi Internasional Palang Merah ke 20 di Wina, Austria pada tahun 1965 dan teks tersebut telah diperbaharui dan tercantum dalam Statuta Palang Merah Internasional yang telah sisahkan melalui Konperensi Internasional Palang Merah ke 25 tahun 1986.<sup>2)</sup>

### 3.2 Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

Sejak tahun 1945 sudah banyak pembicaraan dan diskusi yang menyangkut Palang Merah mengenai tugas-tugas pokoknya. Hasilnya ialah disahkannya dengan suara bulat tujuh azas pokok Palang Merah dalam Konperensi Palang Merah Internasional di Wina tahun 1965.<sup>3)</sup> Kemudian

---

2) Irna Susanti Hardiawan dkk, "45 Tahun Palang Merah Indonesia," (Jakarta : 1990), hal. 5.

3) O p. c i t., hal. 24.

diperbaharui pada Konperensi Internasional Palang Merah ke 25 tahun 1986.

Ketujuh prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah :

#### 1. Kemanusiaan

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka didalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

#### 2. Kesamaan

Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama/kepercayaan, tingkatan atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

#### 3. Kenetralan

Agar senantiasa mendapat kepercayaan diri semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama atau ideologi.

#### 4. Kemandirian

Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan Nasional disamping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan juga harus menaati peraturan negaranya, harus selalu

menjaga otominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini.

#### 5. Kesukarelaan

Gerakan ini memberi bantuan sukarela, yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun,

#### 6. Kesatuan

Di Dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

#### 7. Kesemestaan

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan menolong sesama manusia.<sup>4)</sup>

### 2.3 Sejarah Terbentuknya Palang Merah Indonesia

Sejalan dengan prinsip dasar gerakan Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan suatu organisasi kemanusiaan yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, tanpa diskriminasi, baik pada masa perang maupun pada masa damai, secara nasional maupun internasional.<sup>5)</sup>

---

4) Prinsip-Prinsip Dasar Palang Merah, (Jakarta : Markas besar PMI, 1988).

5) I b i d.

Palang Merah Indonesia, disingkat PMI, sebuah lembaga yang bergerak dibidang amal bakti kemanusiaan, didirikan di Jakarta pada tanggal 17 September 1945, atas anjuran Presiden Soekarno,<sup>6)</sup> sebulan setelah Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Namun demikian gagasan mendirikan organisasi PMI, telah timbul dari para cerdik pandai Indonesia diantaranya, Dr. Bahder Johan, Dr. Senduk dan Dr. Sitanala, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dicapai, yaitu sekitar tahun 1938. Akan tetapi, penjajah pada masa itu tidak mengijinkan, karena diperkirakan akan menimbulkan masalah politik.

Berdasarkan status Palang Merah Internasional dinyatakan bahwa organisasi Palang Merah, diakui sah apabila didirikan pada suatu negara yang merdeka dan merupakan satu-satunya organisasi Palang Merah di negara tersebut. Maka dengan diproklamasikannya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada alasan lagi untuk menghalangi berdirinya PMI.<sup>7)</sup>

Palang Merah Indonesia (PMI), yang telah lahir dalam kancah revolusi, yang telah mengikuti segala jejak Pemerintah Indonesia sejak pembentukannya dan selalu berusaha agar segala tindakan-tindakan pemerintah dan

---

<sup>6)</sup> Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12, (Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hal. 51.

<sup>7)</sup> O p. c i t.

rakyat Indonesia disesuaikan dengan semangat Undang-undang Dasar Republik Indonesia.8)

PMI berkantor pertama kali di Hotel Du Pavillon, Jalan Rijswijk 27 (Hotel Majapahit - sekarang : Kompleks perkantoran Sekretariat Negara bagian barat), Jakarta. Mengingat situasi pada saat itu cukup rawan, maka berdasarkan Keputusan Kongres I tanggal 16 s/d 17 Oktober 1946, Markas Besar dipindahkan ke Yogyakarta, sedangkan Markas Besar di Jakarta dijadikan perwakilan kantor pusat.

Untuk memperkuat keberadaan PMI, maka pada kongres II tanggal 13-14 November 1948 di Yogyakarta, menetapkan bahwa tanggal 17 September diperingati sebagai hari berdirinya Palang Merah Indonesia.

Walaupun Palang Merah Indonesia belum mendapat pengakuan yang sah dari Komite Internasional Palang Merah, namun peranannya selama ini diakui baik. Hal ini berpengaruh terhadap pengakuan Republik Indonesia secara de facto.

Setelah RI diakui secara de facto maupun de jurenya oleh masyarakat internasional, maka pada tanggal 16 Januari 1950, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan

---

8) Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950 - 1960, Koleksi Arsip Nasional di Daerah Tingkat I Sul-Sel, No. Reg. 426.

Presiden No. 25 yang mengukuhkan PMI sebagai satu-satunya organisasi kepalangmerahan di Indonesia. Masih pada tanggal yang sama pukul 17.00 WIB telah dilaksanakan serah terima tugas-tugas kepalangmerahan di Indonesia dari NERKAI (Nederlandsch Roode Kruis Afdeling Indonesia) kepada PMI. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 1950, PMI diakui oleh ICRC sebagai Perhimpunan Palang Merah Nasional. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1950, PMI diterima sebagai anggota Liga Perhimpunan Palang Merah yang ke - 68.

Masih dalam kaitannya dengan penyerahan Nerkaï kepada PMI, maka pada tanggal 20 Mei 1950, Nerkaï menyerahkan Rumah Sakit Kedung Halang miliknya kepada PMI. Mengingat latar belakang sejarah tersebut maka hingga kini Rumah Sakit Umum Kedung Halang tetap menjadi milik PMI dan dikenal dengan nama Rumah Sakit Umum PMI Bogor.

Sejalan dengan perkembangan jaman, maka untuk menegaskan gambaran tugas bagi PMI, maka pada tanggal 29 November 1963, terbit Kepres No. 246 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.<sup>9)</sup>

---

<sup>9)</sup>Aswi Nugraha dkk, "Sejarah Lahirnya Gerakan Palang Merah," (Jakarta : 1990), hal. 6 - 7.

**BAB IV**  
**PALANG MERAH INDONESIA**  
**DAERAH SULAWESI SELATAN 1972-1992**

**4.1 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya PMI  
(PMR dan KSR)**

Dalam perjuangan kemerdekaan, Bangsa Indonesia diperhadapkan oleh berbagai tantangan. Tantangan tersebut berasal dari ulah penjajah yang tentunya Belanda dan Jepang, dimana para pejuang Bangsa Indonesia berupaya melepaskan diri dari belenggu penjajah tersebut. Bentrokan bersenjata terjadi di seluruh Wilayah Indonesia yang mengakibatkan terjadinya banyak korban, baik di pihak pejuang Bangsa Indonesia maupun di pihak Belanda dan Jepang. Sehingga PMI dalam status devakto melaksanakan tugasnya untuk memberikan pertolongannya kepada kedua belah pihak yang menderita akibat perang.<sup>1)</sup>

Tidak setiap saat terjadi bencana alam, tidak juga setiap waktu peperangan meletus. Akan tetapi walau ilmu pengetahuan telah banyak membantu manusia untuk dapat memperhitungkan gejala alam, pada hakekatnya hingga kini

---

<sup>1)</sup>Putra Bakhtiar Barrang, Wawancara, tanggal 3 Maret 1997.

sering bencana itu tiba tanpa disangka-disangka.<sup>2)</sup> Untuk mengantisipasi akan tantangan tersebut melalui wadah Palang Merah Remaja dan Korps Suka Rela yang dibentuk sejak tahun 1950 dan merupakan bagian integral dari PMI, lewat pengurus PMI daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1972 mengadakan pendidikan dan latihan untuk memberikan bekal buat anggota-anggotanya.<sup>3)</sup>

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan salah satu organisasi di Indonesia yang turut membina generasi muda, melalui misinya dimana membina generasi muda yang pancasilais yang mampu dan ikhlas bekerja dan bertanggung jawab melaksanakan akan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, termanifestasikan dalam sikap mental dan perilaku mereka dalam bentuk kegiatan yang berdasarkan pada Tujuh Prinsip gerakan Palang Merah untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama umat yang menderita, baik yang diakibatkan oleh kecelakaan, musibah, bencana alam atau peperangan maupun dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Generasi muda lewat pembinaan PMR dan KSR dipersiapkan menjadi kader-kader Pemimpin Bangsa dan Negara dan khususnya PMI untuk menjalankan tugas-tugas

---

2) Andi Tau, "Buku Informasi Palang Merah Indonesia," (Ujung Pandang : Markas PMI Ujung Pandang, 1992), hal. 16.

3) Andi Tau, Laporan : Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan/Latihan Tenaga PMI Daerah Sul-Sel Semester II Tahun 1989 - 1990, hal. 2, 6.

Kepalangmerahan, salah satu faktor yang penting ialah unsur manusianya, yaitu manusia generasi muda Indonesia yang memiliki syarat :

1. Berjiwa perikemanusiaan dan memiliki rasa solidaritas sosial tinggi.
2. Berpengetahuan Kepalangmerahan dan terampil dengan menguasai teknik memberikan pertolongan dan bantuan.
3. Melaksanakan Tujuh Prinsip Gerakan Palang Merah dalam keadaan damai, bencana atau peperangan, untuk pengamalan Pancasila secara Nasional dan Internasional.<sup>4)</sup>

Didorong oleh rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kesatuan dan keutuhan Pancasila untuk meringankan penderitaan sesama manusia apapun juga sebabnya, maka dalam rangka turut mengisi kemerdekaan Bangsa Indonesia, Palang Merah Indonesia menghimpun sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan dengan menggarap potensi dan kekuatan melalui :

1. Remaja/Pemuda, meliputi : Murid/Siswa (SD/SMTP/SMTA), melalui wadah pengembangan dan pembinaan PMR.
2. Remaja/Pemuda, meliputi : Organisasi Pemuda/Ormas melalui PMR dan KSR.

---

4) Sofyan Muhammad, Proposal Pelatihan Kepemimpinan Satgas KSR PMI Daerah Sul-Sel, Ujung Pandang, 1994, hal. 1.

3. Pemuda/Mahasiswa, meliputi : Unit kegiatan Mahasiswa/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, melalui wadah Korps Suka Rela (KSR).
4. Karyawan/Warga Masyarakat, meliputi : Unit Instansi/Dinas, Ormas, melalui wadah rekayasa sosial PMI.

Palang Merah Remaja (PMR) adalah suatu bagian dari Palang Merah Indonesia dimana anggotanya dididik menjadi manusia yang berperikemanusiaan, dipersiapkan sebagai kader PMI yang baik dan mampu membantu melaksanakan tugas Kepalang Merahan, keanggotaannya mempunyai tiga tingkatan, yaitu :

1. PMR Mula, setingkat usia siswa SD, 7 s/d 12 tahun
2. PMR Madya, setingkat usia SMTP, 13 s/d 16 tahun
3. PMR Wira, setingkat usia SMTA, 17 s/d 21 tahun.

Kemudian KSR yang adalah sukarelawan PMI, dimana menyediakan waktu dan tenaganya dalam satuan khusus yang mampu melaksanakan tugas lapangan dalam bidang Kepalang Merahan. Keanggotaannya meliputi :

1. KSR Pratama, setingkat usia Mahasiswa Perguruan Tinggi
2. KSR Madya, Tinggi (berdasarkan pengetahuan)
3. KSR Wira, keterampilan yang dicapai.

Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh PMI Daerah Sulawesi Selatan melalui generasi muda PMR dan KSR dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan pemuda Indonesia yang tangguh, bertanggung jawab, berke-Tuhanan Yang Maha Esa, cinta tanah air, berbudi luhur, cerdas, tangkas dan terampil, sehat jasmani dan rohaniah, berpandangan nasional yang dipadukan dengan ketinggian moral Pancasila.
2. Membimbing generasi muda kearah kedewasaan hidup yang sehat jasmani dan rohaniah, semangat kepedulian sosialnya tinggi serta mempersiapkan mereka untuk memikul tanggung jawab dan mampu serta cakap dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nasional secara aktif, sehingga mereka benar-benar mampu berfungsi sebagai pewaris dan penerus perjuangan bangsa Indonesia.
3. Pemuda, Remaja PMR dan KSR dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin Palang Merah adalah remaja dan pemuda yang heterogen keberadaannya dari berbagai kalangan remaja/pemuda, masyarakat dari instansi/Dinas Perusahaan.
4. Pemuda remaja PMR dan KSR, yang mau dan mampu menjadi pemimpin PMI, merupakan remaja/pemuda yang tingkat kesadarannya terhadap negara dan bangsa cukup tinggi, sebab menjadi pemimpin PMI dengan ikhlas dan tanpa pamrih menyumbangkan tenaga, pikiran dan hartanya demi kelangsungan hidup Palang Merah di masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>5)</sup>

---

5) I b i d., hal. 3.

Sebagai realisasi dari pembinaan generasi muda melalui wadah PMR dan KSR ketika di tahun 1981 dimana terjadi musibah Kapal Tampomas II, bersama dengan Kodim, Poltabes dan Tim SAR serta Pramuka memberikan pertolongan.<sup>6)</sup> Kapal tersebut terbakar dan tenggelam di Perairan Masalembo. Kapal penumpang ini, berangkat dari Tanjung Priok, Jakarta menuju ke Ujung Pandang, 24 Januari 1981 dengan membawa penumpang 1.138 orang, 197 mobil dan kurang lebih 390 sepeda motor, 1 mesin giling serta 185 kantong pos.<sup>7)</sup>

Mengenai kapal tersebut, mulai terbakar pada Minggu malam, 25 Januari dan sampai hari Rabu, 28 Januari kemudian kapal tersebut tenggelam. Diperkirakan tenggelam pada kedalaman 60 meter di Perairan Masalembo yang dalam Bahasa Makassar (Gowa), Masalembo artinya, angin siklon atau angin puting beliung.<sup>8)</sup> Sesuai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari Ujung Pandang termasuk Jakarta dan Surabaya, penumpang yang dianggap hilang jumlahnya tidak kurang dari 350 orang.<sup>9)</sup>

---

<sup>6)</sup> Hermoedjo, Wawancara, tanggal 6 Pebruari 1997.

<sup>7)</sup> S. Sinasari Ecip, "Musibah Tampomas II," (Ujung Pandang : Bhakti Baru, 1981), hal. 6 - 7.

<sup>8)</sup> I b i d., hal. 8.

<sup>9)</sup> I b i d., hal. 102.

Dalam musibah tersebut PMI yang bekerja sama dengan Kodim, Poltabes, SAR dan Pramuka dalam hal :

1. Memberikan pertolongan P3K
2. Menyelamatkan para korbang yang terapung-apung dilaut.
3. Mengangkat para korban dari laut ke kapal dan membawa ke Ujung Pandang.<sup>10)</sup>
4. Menurunkan korban baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dari kapal ke Ambulans.<sup>11)</sup>
5. Diangkut dengan Ambulas ke tempat penampungan para korban yaitu di Markas Kodim 1408/BS Ujung Pandang.<sup>12)</sup>

Jumlah korbang yang diberi pertolongan yang tiba di Ujung Pandang sebanyak 780 orang. 664 orang yang masih hidup dan yang meninggal 111 orang. Korban tersebut yang ditampung di Kodim kemudian diumumkan kepada keluarganya supaya datang melihat, menolong dan membawanya pulang untuk dikebumikan.

Musibah yang terjadi itu, oleh PMI Cabang Ujung Pandang menurunkan Satgas KSR sebanyak dua peleton (60 orang) selama tujuh hari penuh melaksanakan bantuan

---

10) A. Sattu Balik, Wawancara, tanggal 12 Januari 1998.

11) Jamila, Wawancara, tanggal 5 Januari 1998.

12) Asrul Tanjung, Wawancara, tanggal 15 Desember 1997.

pertolongan di Pulau Masalembo bersama dengan Satlak (Satuan Pelaksana PKB (Penanggulangan Korban Bencana) Daerah Tingkat dan II Ujung Pandang. Bantuan lain yang diberikan khususnya kepada korban yang masih hidup diberikan bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan. Selebihnya korban yang tidak ditemukan dilanjutkan pencariannya oleh ALRI Wilayah Ujung Pandang.<sup>13)</sup>

Sebagai realisasi pengamalan Pancasila, maka peran PMI sangat terasakan ketika di penghujung tahun 1987, banjir besar melanda delapan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, dimana 55.513 rumah hancur, puluhan bangunan penting rusak berat, sawah tambak dan ratusan ternak binasa, 117 orang meninggal dan 60.000 keluarga menderita akibat musibah tersebut. Sehingga ditaksir kerugian dalam bencana sekitar Rp. 72,5 milyar.

Untuk meringankan beban penderitaan penduduk, maka Palang Merah Daerah Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Palang Merah Pusat mengerahkan tenaga Korps Suka Rela (KSR) dan Palang Merah Remaja (PMR) untuk membuka Pos Dapur Umum selama 3X24 jam serta menyumbangkan bahan pangan, pakaian dan obat-obatan serta membantu evakuasi

---

<sup>13)</sup>Putra Barrang, Wawancara, tanggal 5 Maret 1997.

dan pelayanan kesehatan.<sup>14)</sup> Khusus untuk PMI Pusat mensuplay bantuan berupa beras 7 ton.<sup>15)</sup>

Dalam pemerataan pelayanan, PMI menghadapi tantangan dimana dalam kesiap siagaan memberikan bantuan pertolongan dalam keadaan dibutuhkan masyarakat secara darurat, belum dapat dilaksanakan secara merata karena PMI kurang dikenal tentang kemampuannya oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak diberi peranannya. Misalnya saja pada musibah Bawakaraeng 1987 ketika masyarakat mengadakan Sholat Idul Adha dimana selesai mengadakan Sholat, banyak yang tidak bisa lagi melihat jalan untuk turun disebabkan oleh kabut tebal. Dalam musibah tersebut oleh Tim SAR Brimob bersama dengan masyarakat setempat mengadakan pencarian dan menemukan 20 korbang, diantaranya 17 orang yang sudah meninggal.<sup>16)</sup>

Dalam periode 1991 - 1992, dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang ditandai dengan banyaknya kebakaran. Dalam periode ini sebanyak 28 terjadi kebakaran dan yang menjadi

---

14) Irna Susanti Hardiawan, "45 Tahun Palang Merah Indonesia," (Jakarta: 1990), hal. 3.

15) Andi Tau, Laporan, Pelaksanaan Program Kerja PD PMI Sul-Sel Tahun 1987 - 1989, (Ujung Pandang : 1989), hal. 9.

16) A. Sattu Balik, hal. , Catatan Kaki No. 10.

sasarannya adalah rumah penduduk, ruko dan pasar.<sup>17)</sup> Dalam menghadapi bencana seperti ini, PMI bekerja sama dengan Departemen Sosial melalui koordinasi dengan Instansi terkait melalui Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kotamadya Ujung Pandang, dalam hal ini PU, Departemen Kesehatan, ABRI dan Pemda.

Dalam setiap kejadian instansi terkait tersebut turun ke lokasi bencana. Departemen Kesehatan dengan bantuan berupa obat-obatan, Departemen Sosial dengan menyiapkan Dapur umum, Pemda menyediakan sumbangan berupa beras, Pakaian bekas, PU dengan menyiapkan perlengkapan pemadam kebakaran dan ABRI dengan satuan keamanan. Perlengkapan berupa bantuan tersebut dapat terlaksana berkat adanya koordinasi yang baik.

Namun kerja sama yang sudah terjalin itu masih terdapat kelemahan PMI sebagai Pengurus Cabang, dimana kurang tanggapnya menangani masalah bencana alam yang terjadi di wilayah cabang, misalnya : terjadinya bencana kebakaran, banjir, angin topan terlambat memberikan laporan. Hal tersebut baru diketahui setelah ada pemberitahuan di Surat Kabar.

---

<sup>17)</sup> Borahima, Buku Daftar Bencana PMI Cabang Ujung Pandang, 1987.

#### 4.2 Pelayanan Usaha Transfusi Darah (PUTD)

Sesuai dengan penugasan khusus untuk menyelenggarakan Usaha Pelayanan Transfusi Darah melalui PP No. 18 Tahun 1980, PMI berperan secara fungsional menyelenggarakan pengumpulan darah dari masyarakat (donor), pengelolaan dan penyimpanan serta penyediaan darah untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat.

Untuk mengantisipasi masalah kemasyarakatan itu, telah disusun garis-garis kebijaksanaan dalam Munas 1986 dan Musda 1987 dalam usaha Peningkatan Pelayanan Transfusi Darah, dimana Cabang PMI telah giat mengupayakan tersedianya Donor Darah Sukarela di kalangan masyarakat, pemuda dengan mengadakan koordinasi dengan Instansi/ Dinas/ Lembaga/ Perusahaan, sekolah-sekolah di wilayah cabang PMI.

Ada enam pelaksana Pelayanan Usaha Transfusi Darah Cabang (PUTDC), yaitu :

1. PUTDC PMI Ujung Pandang
2. PUTDC PMI Pare-Pare
3. PUTDC PMI Bone
4. PUTDC PMI Luwu
5. PUTDC PMI Bulukumba.
6. PUTDC PMI Cabang Maje'ne (sedang dalam tahap persiapan).

Sebagai gambaran situasi penerimaan darah, baik melalui donor sukarela maupun donor pengganti (donor keluarga) di empat PUTDC PMI tahun 1990 - 1991, masing-masing dari PUTDC Ujung Pandang, Pare-Pare, Bone dan Luwu adalah sebagai berikut :

A. Donor Darah Sukarela :

1. Golongan Darah A	=	2.334	Orang
2. Golongan Darah B	=	884	Orang
3. Golongan Darah O	=	2.810	Orang
4. Golongan Darah AB	=	490	Orang
		<hr/>	
Jumlah		7.474	Orang

B. Donor Darah/Pengganti/Keluarga :

1. Golongan Darah A	=	1.490	Orang
2. Golongan Darah B	=	1.216	Orang
3. Golongan Darah O	=	1.161	Orang
4. Golongan Darah AB	=	348	Orang
		<hr/>	
Jumlah	=	4.215	Orang

Jumlah seluruhnya 11.693 orang, dibandingkan dengan tahun 1989 - 1990 sebanyak 10.165 orang. Berarti ada kenaikan 15, 28% atau 1.428 orang.

Mengenai fasilitas masing-masing PUTDC, mengupayakan sarana setempat serta menetapkan sendiri besarnya biaya penyediaan darah dengan dasar kemampuan masyarakat umum.

Jika seorang ingin menjadi pendonor, baik itu sukarela maupun pengganti keluarga bila seseorang :

1. Berusia 17 - 60 tahun
2. Mempunyai berat badan minimal 40 kg untuk wanita dan 45 kg untuk pria.
3. Mempunyai tekanan darah 100/60 - 180/100 mm Hg dan kadar Hb sekurang-kurangnya 12 gr %.
4. Tidak menderita penyakit kuning (Hepatitis), TBC, atau penyakit berat lainnya.
5. Tidak mempunyai luka atau infeksi.
6. Tidak sedang menjalani suatu pengobatan.
7. Tidak dalam keadaan hamil atau menyusui.

Jika seseorang menjadi donor darah yang tentunya mempunyai syarat, maka dalam hal menyumbang darah mempunyai tata cara. Tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran

Penyumbang darah mendaftarkan diri kepada petugas sebagai calon donor darah sukarela. Setelah itu kemudian diberi formulir oleh petugas untuk diisi.

#### 2. Pemeriksaan Darah dan Kesehatan

Setelah itu petugas akan menimbang berat badan, memeriksa golongan darah dan kesehatan serta tekanan darah.

#### 3. Aftap Darah

Lalu dibawa ke ruang Aftap Darah. Darah anda akan diambil sebanyak 250 cc dan ditampung di dalam kantong plastik khusus. Dalam tempo singkat tubuh seseorang

sudah menyesuaikan diri lagi. Plasma akan normal kembali dalam tempo 24 jam, sedangkan sel-sel darah akan kembali normal dalam tempo seminggu.

#### 4. Makanan Penyegar

Setelah beristirahat sejenak, akan diberi makanan dan minuman penyegar. Pada umumnya berupa susu/ kopi, telur serta makanan ringan kecil lainnya.

#### 5. Setelah Penyumbangan

Selanjutnya akan memperoleh kartu donor dan vitamin sekedarnya. Kemudian petugas akan memberikan petunjuk kapan waktu kunjungan seseorang untuk masa donor berikutnya dan penyumbangan darah dilakukan sebanyak-banyaknya dua setengah sampai tiga bulan sekali atau empat sampai lima kali setahun.

### 4.3 Sumber Dana

PMI bersumber dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Oleh karena PMI bersumber dari masyarakat, maka sumber dananya diperoleh dari masyarakat melalui penyelenggaraan bulan dana PMI, yang dilaksanakan dua bulan sekali dalam satu tahun.

Penyelenggaraan bulan dana tersebut dilaksanakan dengan SK Menteri Sosial RI pada setiap tahun diseluruh propinsi dan kabupaten serta kotamadya yang dilaksanakan oleh suatu badan panitia yang disusun oleh pengurus PMI cabang disetiap kabupaten. Panitia bulan dana PMI personilnya terdiri dari :

1. Pengurus PMI Cabang
2. Instansi terkait
3. Salah seorang dari anggota Muspida secara bergiliran tiap tahun jadi ketua bulan dana PMI.

Selain SK dari Mensos RI juga ada SK dari Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I sekaligus SK Bupati dan Walikota.

Mengenai pengelolaan Bulan Dana, dilaksanakan oleh panitia penyelenggaraan bulan dana PMI dimana membuat kupon-kupnn dengan nilai Rp 100, Rp 500, Rp 1000, Rp 1500 (berpariasi). Selain kupon juga diadakan pembuatan stikker dengan nilai yang sama. Setelah itu kupon dan stikker tersebut dibagikan kesetiap Kecamatan untuk disalurkan ke masyarakat. Sedangkan di instansi disebarakan lagi ke masyarakat. Sedangkan di instansi disebarakan lagi ke karyawan, juga unit-unit perusahaan. Usaha ini dilakukan dalam jangka waktu dua bulan.

Hasil nilai kupon pada tiap penyelenggaraan bulan dana PMI itu, dikumpulkan dari penyalur-penyalar kupon keudian dihitung hasil jumlah kotor yang dicapai. Setelah terkumpul semuanya, dari jumlah hasil kotor kemudian dikeluarkan biaya administrasi penyelenggara bulan dana yaitu 10 % dari jumlah kotor. Hasil bersih bulan dana ini, oleh panitia penyelenggara bulan dana PMI menyerahkan kepada pengurus PMI cabang untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Pendayagunaan dari hasil bulan dana ini dibagi tiga:

1. 5 % untuk PMI pusat sebagai dana kesiapsiagaan
2. 10 % untuk PMI daerah sebagai dana kesiapsiagaan
3. 85 % untuk PMI cabang dengan pendayagunaan sebagai berikut :
  - a. Bayar biaya rutin 25 % untuk Markas Cabang PMI
  - b. Biaya pendayagunaan bencana alam 30 %
  - c. Biaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 30 %.

Hasil kotor dan hasil bersih dipertanggungjawabkan setiap PMI Cabang kepada :

1. Pemda Tingkat II Kabupaten Kotamadya
2. Depsos Kabupaten Kotamadya
3. PMI Daerah
4. Gubernur
5. PMI Pusat
6. Depsos.

Selain penyelenggaraan bulan dana tersebut, ada juga sumber dana lain yang secara sukarela dari :

1. Dermawan menurut kemampuannya, misalnya dari instansi pemerintah atau swasta
2. Pemda Tingkat I dan II
3. Bantuan dana abadi dari konlomerat.

Dana yang berasal dari masyarakat, baik melalui perorangan, organisasi atau Instansi, secara berkelanjutan dalam bentuk natura, seperti beras, gula, teh, Indo Mie dan pakaian bekas.

Oleh karena itu, hidup suburnya PMI dalam melaksanakan tugas kemanusiaan, baik dalam keadaan damai, bencana atau perang, dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan untuk membantu dan menolong sesama, sumber dananya dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Demikianlah secara bertahap dan berkesinambungan pengurus PMI melaksanakan sumbangsih kemanusiaannya dari tahun ke tahun menurut situasi dan kondisi.

## BAB V

# K E S I M P U L A N

Palang Merah Indonesia atau disingkat PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang lahir satu bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yakni 17 September 1945 pada saat rakyat Indonesia tengah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja dicapai. Pada masa tersebut peran PMI sudah mulai menampakkan dirinya sebagai suatu organisasi kemanusiaan walaupun dalam kondisi yang serba sulit dimana PMI ketika itu memberikan pertolongan kepada korban akibat perang. Jadi PMI ketika itu memberikan bantuan berupa obat-obatan dan membalut tentara yang terluka akibat perang.

Khusus di Sulawesi Selatan terjadi pergolakan-pergolakan keganasan Westerling dan munculnya gerakan DI/TII antara tahun 1946 - 1965, masyarakat Sulawesi Selatan ketika itu berada dalam keadaan terbelenggu dan tertindas. Westerling dengan kebiadabannya membunuh dan menyiksa rakyat yang tidak berdosa secara keji sementara gerombolan DI/TII dengan aksinya membakar dan memusnahkan rumah-rumah penduduk. Gerakannya di tahun 1950 di bawah pimpinan Kahar Muzakkar dimana terjadi konflik dengan Pasukan ABRI karena merasa tidak puas akan kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan oleh pimpinan angkatan Perang dan mengambil sikap menentang dan memisahkan diri

dan bergabung dengan Darul Islam pimpinan Kartosiwiryo. Konflik dengan pasukan ABRI tersebut mendapat dukungan dari kalangan bangsawan. Dalam pergolakan yang ditandai dengan pertempuran antara pasukan ABRI dengan anak buah Kahar Muzakkar yang tentunya dalam peristiwa seperti ini kedua belah pihak terjadi korban dan oleh PMI tidak memandang siapa-siapa. Kedua belah pihak mereka tolong atas dasar prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu salah satunya adalah "Kesamaan" dimana didalam memberikan pertolongan itu tanpa membedakan dari pihak mana, yang ditolong adalah manusia dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

Sebagai rangkaian dari pergolakan-pergolakan yang terjadi di Sulawesi Selatan dimana terjadi peperangan yang berkepanjangan antara pasukan Kahar Muzakkar dengan ABRI, maka berakhir ketika Kahar Muzakkar tertembak mati dalam suatu pertempuran. dengan pasukan yang berada dibawah komando Kolonel Andi Yusuf selaku Panglima Kodam XIV Hasanuddin.

Tidak setiap saat terjadi bencana alam, tidak juga setiap waktu peperangan meletus. Akan tetapi walaupun ilmu pengetahuan telah banyak membantu manusia untuk dapat memperhitungkan gejala alam, pada hakekatnya hingga kini sering bencana itu tiba tanpa disangka-sangka. Sehingga memasuki Orde Baru, oleh Pengurus PMI Sulawesi Selatan menjawab tantangan tersebut dengan dimulainya pembinaan

dan pengembangan Sumber Daya yaitu PMR dan KSR yang mana telah membina dan melatih putra putri Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk bencana.

Sebagai realisasi dari pembinaan generasi muda melalui wadah PMR dan KSR, di Sulawesi Selatan ketika terjadi musibah Tampomas II di tahun 1981 yang merupakan musibah terparah dan terburuk dalam dunia pelayaran Indonesia, Dalam musibah tersebut PMI Sulawesi Selatan dengan KSR-Nya dengan setia bekerja sama dengan ABRI dan SAR serta Pramuka memberikan pertolongan terhadap korban baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Dalam periode 1987 - 1992 di Sulawesi Selatan ditandai dengan banyaknya musibah bencana alam, kebakaran, banjir yang memporak-porandakan rumah penduduk, ruko. Suatu pertanda bahwa PMI senantiasa terbuka dan rasa ingin bekerja sama, dilihat dari adanya koordinasi dan kerja sama yang terjalin dengan instansi lain sehingga dapat merampungkan berbagai macam bentuk bantuan dengan mengumpulkan bahan sandang dan pangan.

Sesuai dengan penugasan khusus penyelenggara Usaha Pelayanan Transfusi Darah melalui PP No. 18 Tahun 1980, PMI berperan secara fungsional menyelenggarakan Pengumpulan darah dari masyarakat (donor), pengelolaan dan Penyimpanan serta penyediaan darah untuk memenuhi Perintaan masyarakat yang semakin meningkat. Sebagai gambaran bahwa terjadi peningkatan dalam hal pelaksanaan

Pelayanan Usaha Transfusi Darah, yaitu pada tahun 1990 - 1991, donor darah sukarela dan pengganti keluarga, 11.693 orang dibandingkan dengan tahun 1989 - 1990 sebanyak 10.165 orang. Berarti ada kenaikan 15, 28 % atau 1.528 orang.

Suatu hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan PMI adalah adanya kegiatan usaha pengumpulan dana yang dikenal dengan nama bulan dana. Pelaksanaan bulan dana di 23 cabang PMI Sul-Sel hingga tahun 1992 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya usaha dan kerja keras Pengurus Daerah PMI Sulawesi Selatan untuk selalu turun kelapangan mengadakan, melalui Pemda Tingkat I, para Bupati dan Walikota, para Ka Kanwil/Jawatan Dinas/Instansi yang terkait serta unsur ABRI dan pengusaha-pengusaha.

Oleh karena itu hidup suburnya PMI dalam melaksanakan tugas kemanusiaan, baik dalam keadaan damai, bencana atau perang, dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan untuk membantu dan menolong sesama, sumber dananya dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Arsip

ANRI Propinsi Sulawesi Selatan. Koleksi Arsip Nasional Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 1950 - 1960, No. Reg. 426.

ANRI Propinsi Sulawesi Selatan. Koleksi Arsip Pemeritahan Daerah Makassar, Daerah Swatanra Makassar 1958 - 1959, No. Reg. 206 Tahun 1950 - 1960.

### B. Buku dan Skripsi

Abdullah, Taufik, Sejarah Lokal di Indonesia Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985.

Arfah, Man, Partisipasi Buruh Pelabuhan Makassar dalam Perjalanan Sejarah Sulawesi Selatan 1945 - 1973, Ujung Pandang, Skripsi Sarjana Sastra Universitas Hasanuddin, 1992

Asmarani, Perjuangan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan Perubahan Namanya Menjadi Kotamadya Ujung Pandang, Ujung Pandang, Biro Hukum Kantor Gubernur KDH Sulawesi Selatan, 1972

Borahimah, Buku Daftar Bencana PMI Cabang Ujung Pandang, 1987

Buku Kenangan Dirgahayu HUT Kotamadya Ujung Pandang ke-82, Ujung Pandang; Yayasan Bina Terpadu, 1982.

Ecip, S, Sinansari, Musibah Tampomas II Ujung Pandang: Bhakti Baru, 1981.

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12, Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Gonggong, Anwar, Abdul Gakhar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak, Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1989.

- Hardiawan, Irna, Susanti dkk, 45 Tahun Palang Merah Indonesia, Jakarta : 1990.
- Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta, PT. Gramedia, 1992.
- Mukhlis, dkk, Sejarah Kota Besar Makassar/Kotamadya Ujung Pandang 1950 - 1970, Ujung Pandang, 1985.
- Nugroho, Aswi, dkk. Sejarah Lahirnya Gerakan Palang Merah, Jakarta, 1990
- Patompo, Dg, H. M., Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan, Ujung Pandang, 1976.
- Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I, Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1991.
- Poerwantara dan Hugiono, Pengantar Ilmu Sejarah, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Soeleman, Munandar, Ilmu Sosial Dasar, Bandung : PT Uresko, 1989.
- Tau, Andi, Buku Informasi Palang Merah Indonesia, Ujung Pandang : Markas Besar PMI Sul-Sel, 1992.

### C. Makalah dan Laporan

- Kumpulan Makalah Dalam Seminar Makassar, Ikhtisar Masalah Segi Sejarah, Ujung Pandang : Yayasan Intim, 1981.
- Latif, Abd, Pemahaman Dasar Tentang Sejarah, Disampaikan Pada Seminar Sejarah dan Arkeologi, Ujung Pandang, 1989.
- Mattulada, What Is A Name, Disampaikan Pada Acara Diskusi Panel "Makassar Bersinar", Ujung Pandang, 1991.
- ollingomang, L, Edward, Sumber dan Kritik Sejarah, Disampaikan pada Pelatihan Sejarah Se-Kotamadya Ujung Pandang, Ujung Pandang, 1992.
- Saman, Yusuf, Muhammad, Tugas dan Fungsi Deppen dengan PMI Membina Masyarakat Pedesaan, Disampaikan Pada Musda VI PMI Sul-Sel, Ujung Pandang, 1992.
- Sapada, Andi, Peranan TNI Resimen Hasanuddin dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI di Sulawesi Selatan, Disampaikan Pada Seminar Sejarah Makassar, Ujung Pandang, 1992.

Tau, Andi, Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan/Latihan Tenaga PMI Daerah Sulawesi Selatan Semester II tahun 1989 - 1990.

-----, Pelaksanaan Program Kerja PD PMI Sulawesi Selatan Tahun 1987 - 1989, Ujung Pandang, 1989.

-----, Laporan Yang Disampaikan pada Acara Pembukaan Musda PMI Sul-Sel, Ujung Pandang, 1992.

-----, Pelaksanaan Program Kerja PMI Sulawesi Selatan tahun 1990 - 1991, Ujung Pandang, 1991.

#### D. Majalah dan Surat Kabar

Rukmana, Hardiyanti, Siti, "Sambutan Ketua PMI pada HUT ke-50." dalam suara PMI, Edisi No. 32, September, 1995.

Sutowo, Ibnu, "Dimensi Dalam Gerakan Palang Merah." dalam Berita Organisasi, No. 27, Desember, 1992.

Supeno, Hadi, "Palang Merah Indonesia dari Perjuangan Revolusi ke Perjuangan Pengentasan Kemiskinan." dalam Suara PMI, Edisi 33/November, 1995.

Tanggart, MC, Donald, "Kebijaksanaan Pembangunan Kota di Indonesia : Kasus Ujung Pandang." dalam Masyarakat Indonesia, No. 1 Tahun III, 1976.

#### E. Brosur dan Proposal

Muhammad, Sofyan, Proposal Pelatihan Kepemimpinan Satgas KSR PMI Daerah Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1994.

Prinsip-Prinsip Dasar Palang Merah, Jakarta : Markas Besar PMI, 1988.